

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI (Resiko Rendah) Untuk UMK**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |         |            |  |  |
|----------------------------------|--|---|---------|------------|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |         |            |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 1. Data pelaku usaha;<br>2. Data kegiatan usaha;<br>3. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .   |         |            |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur          | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Pemohon</th> <th style="width: 50%;">Sistem OSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon | Sistem OSS |  |  |
| Pemohon                          | Sistem OSS                               |   |         |            |  |  |
|                                  |  |   |         |            |  |  |
| 3.                               | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  |         |            |  |  |
| 4.                               | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya  |         |            |  |  |
| 5.                               | Produk pelayanan                         | NIB   |         |            |  |  |
| 6.                               | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>2. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>4. Twiter : @dpmpdspkepri</li> <li>5. Instagram : @dpmpspprovinsikepri</li> <li>6. Facebook: DPMP TSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>7. Website: <a href="http://dpmpdsp.kepriprov.go.id">dpmpdsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>8. Email : <a href="mailto:dpmpdspkepri20@gmail.com">dpmpdspkepri20@gmail.com</a></li> <li>9. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpdspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpdspkepri</a></li> <li>10. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |         |            |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</li> <li>14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</li> <li>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internet</li> <li>2. Aplikasi OSS</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner</li> <li>4. <i>Touchscreen</i></li> </ol>   |

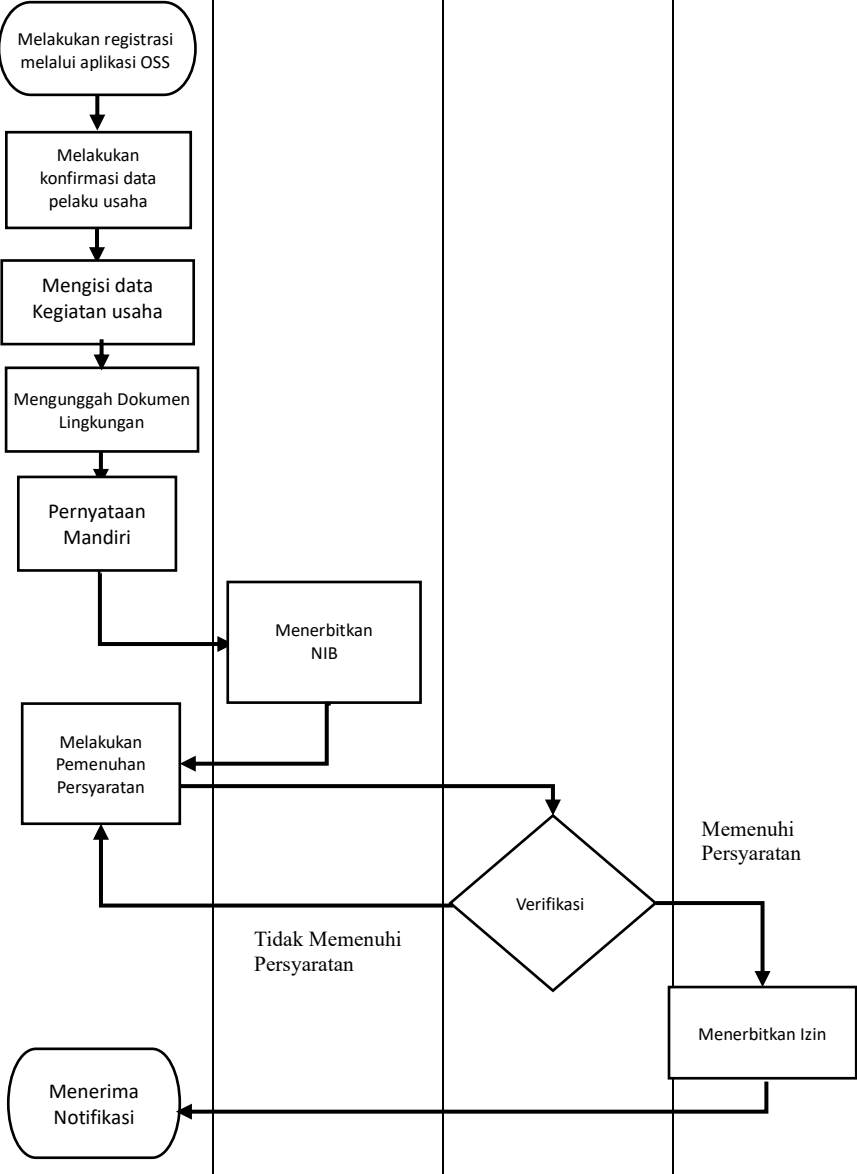
| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 5. Alat Tulis Kantor<br>6. Peralatan kantor<br>7. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>8. Almari dokumen<br>9. Telepon<br>10. Mobil dan sepeda motor dinas<br>11. Meja dan kursi<br>12. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 1. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>2. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>3. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>4. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>5. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>6. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>7. Mampu mengoperasikan OSS.<br>8. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>2. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>a. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>b. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 1. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>2. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>2. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>3. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>4. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>5. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>6. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>7. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>8. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>9. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>10. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>1. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>2. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Tinggi) Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)

| NO                               | KOMPONEN                          | URAIAN  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan             | 4. Data pelaku usaha;<br>5. Data kegiatan usaha;<br>6. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon      | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS  | DPMPTSP/BKPM |                                   |            |              |  |  |  |  |
|                                  |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D[Mengunggah Dokumen Lingkungan]     D --&gt; E[Pernyataan Mandiri]     E --&gt; F[Menerbitkan NIB]     F --&gt; G[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     G --&gt; H{Verifikasi}     H -- Memenuhi Persyaratan --&gt; I[Menerbitkan Izin]     H -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; G     I --&gt; J([Menerima Notifikasi]) </pre>  |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Izin   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>11. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>12. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>13. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>14. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>15. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>16. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>17. Website: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>18. Email : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>19. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>20. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>29. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>32. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>34. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>13. Internet</p> <p>14. Aplikasi OSS</p> <p>15. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>16. <i>Touchscreen</i></p> <p>17. Alat Tulis Kantor</p> <p>18. Peralatan kantor</p> <p>19. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>20. Almari dokumen</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 21. Telepon<br>22. Mobil dan sepeda motor dinas<br>23. Meja dan kursi<br>24. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 9. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>10. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>11. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>12. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>13. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>14. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>15. Mampu mengoperasikan OSS.<br>16. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 3. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>4. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>c. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>d. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 3. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>4. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 11. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>12. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>13. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>14. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>15. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>16. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>17. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>18. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>19. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>20. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

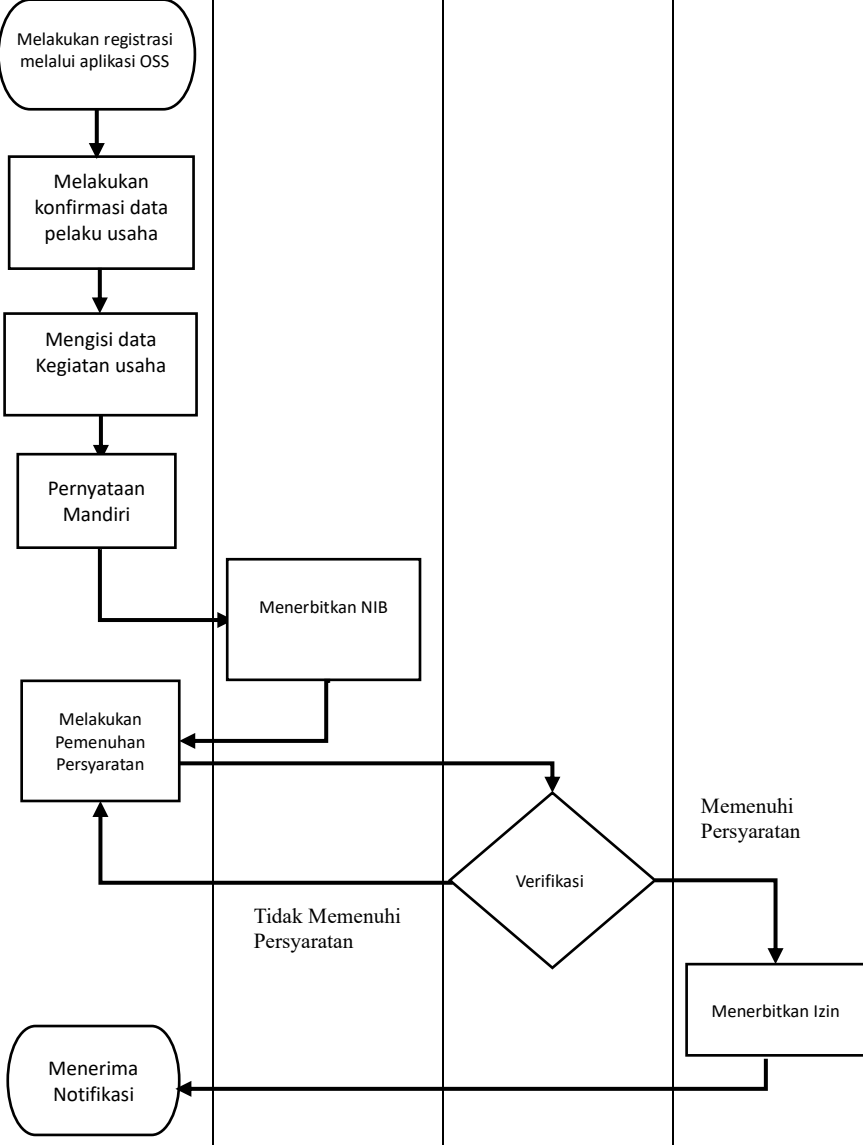
| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 3. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>4. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Tinggi) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)**

| NO                               | KOMPONEN                          | URAIAN   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                   |  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan             | 7. Data pelaku usaha;<br>8. Data kegiatan usaha;<br>9. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="height: 300px;"></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon      | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS   | DPMPTSP/BKPM |                                   |            |              |  |  |  |  |
|                                  |                                   |  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D[Pernyataan Mandiri]     D --&gt; E[Menerbitkan NIB]     E --&gt; F[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     F --&gt; G{Verifikasi}     G -- "Memenuhi Persyaratan" --&gt; H[Menerbitkan Izin]     G -- "Tidak Memenuhi Persyaratan" --&gt; F     H --&gt; I([Menerima Notifikasi]) </pre>  |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Izin   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>21. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>22. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>23. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>24. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>25. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>26. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>27. Website: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>28. Email : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>29. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>30. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 37. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>38. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>39. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>40. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>42. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>43. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>44. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>45. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>47. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>48. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>50. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>52. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>53. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>54. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>25. Internet</p> <p>26. Aplikasi OSS</p> <p>27. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>28. <i>Touchscreen</i></p> <p>29. Alat Tulis Kantor</p> <p>30. Peralatan kantor</p> <p>31. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>32. Almari dokumen</p>   |

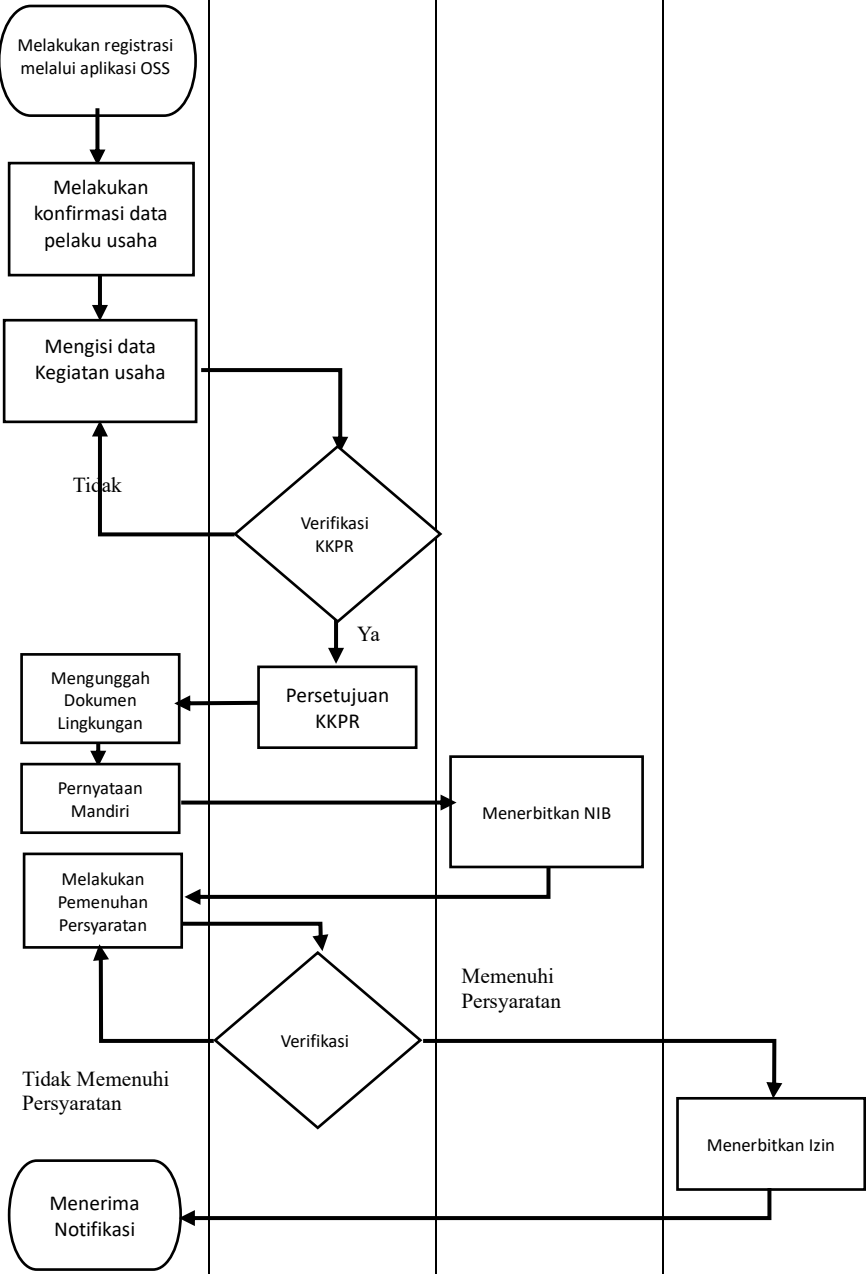
| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 33. Telepon<br>34. Mobil dan sepeda motor dinas<br>35. Meja dan kursi<br>36. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 17. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>18. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>19. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>20. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>21. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>22. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>23. Mampu mengoperasikan OSS.<br>24. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 5. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>6. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>e. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>f. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 5. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>6. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 21. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>22. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>23. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>24. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>25. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>26. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>27. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>28. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>29. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>30. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 5. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>6. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Tinggi) Wajib Dokumen Lingkungan (Non UMK)**

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |  |                   |                      |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |  |                   |                      |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 10. Data pelaku usaha;<br>11. Data kegiatan usaha;<br>12. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> . |  |                   |                      |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <b>Pemohon</b>   | <b>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</b> | <b>Sistem OSS</b> | <b>DPMPTSP/ BKPM</b> |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     D -- Tidak --&gt; C     E --&gt; F[Mengunggah Dokumen Lingkungan]     F --&gt; G[Pernyataan Mandiri]     G --&gt; H[Menerbitkan NIB]     H --&gt; I[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     I --&gt; J{Verifikasi}     J -- Memenuhi Persyaratan --&gt; K[Menerbitkan Izin]     J -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; I     K --&gt; L([Menerima Notifikasi])   </pre>   |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Izin   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>31. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>32. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>33. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>34. Twiter : @dpmpstpkpri</li> <li>35. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</li> <li>36. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>37. Website: dpmpstsp.kepriprov.go.id</li> <li>38. Email : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></li> <li>39. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></li> <li>40. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 55. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  |




| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Informasi Publik</p> <p>56. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>57. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>58. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>60. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>61. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>62. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>63. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>64. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>65. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>66. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>68. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>70. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>71. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>72. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>37. Internet</p> <p>38. Aplikasi OSS</p> <p>39. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>40. <i>Touchscreen</i></p> <p>41. Alat Tulis Kantor</p> <p>42. Peralatan kantor</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 43. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>44. Almari dokumen<br>45. Telepon<br>46. Mobil dan sepeda motor dinas<br>47. Meja dan kursi<br>48. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 25. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>26. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>27. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>28. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>29. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>30. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>31. Mampu mengoperasikan OSS.<br>32. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 7. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>8. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>g. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>h. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 7. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>8. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 31. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>32. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>33. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>34. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>35. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>36. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>37. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>38. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>39. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>40. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

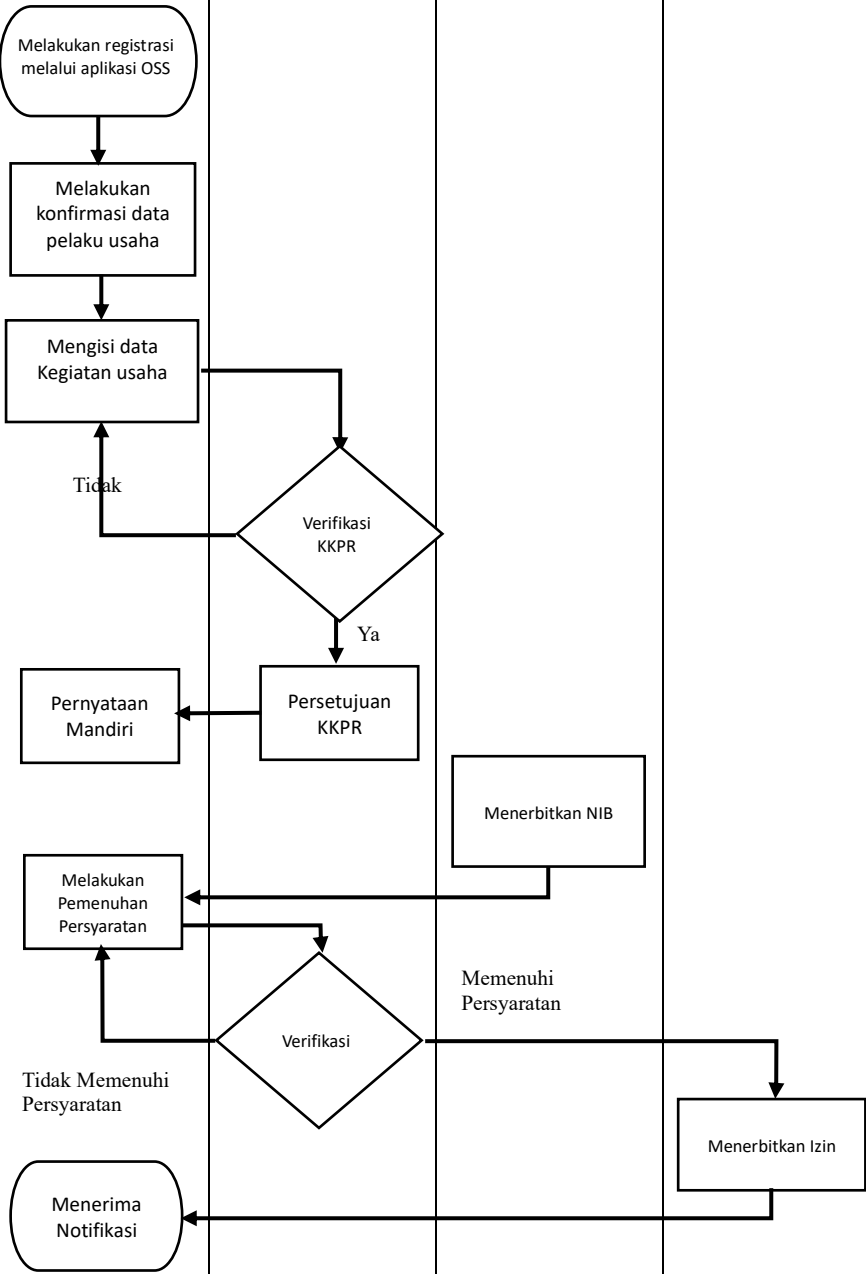
| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 7. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>8. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Tinggi) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (Non UMK)**

| NO   | KOMPONEN                          | URAIAN   |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>   |                                   |  |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan             | 13.Data pelaku usaha;<br>14.Data kegiatan usaha;<br>15.Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .  |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
| 2.   | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/ BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon       | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/ BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon  | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS   | DPMPTSP/ BKPM |                                   |            |               |  |  |  |  |
|  |                                   |  |               |                                   |            |               |  |  |  |  |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Tidak --&gt; C     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     E --&gt; F[Pernyataan Mandiri]     F --&gt; G[Menerbitkan NIB]     G --&gt; H[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     H --&gt; I{Verifikasi}     I -- Memenuhi Persyaratan --&gt; J[Menerbitkan Izin]     I -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; H     J --&gt; K([Menerima Notifikasi])   </pre>   |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Izin   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>41. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>42. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>43. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>44. Twiter : @dpmpstpkpri</li> <li>45. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</li> <li>46. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>47. Website: dpmpstsp.kepriprov.go.id</li> <li>48. Email : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></li> <li>49. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></li> <li>50. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 73. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Informasi Publik</p> <p>74. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>75. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>76. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>77. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>78. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>79. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>80. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>81. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>82. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>83. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>84. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>86. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>88. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>89. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>90. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>49. Internet</p> <p>50. Aplikasi OSS</p> <p>51. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>52. <i>Touchscreen</i></p> <p>53. Alat Tulis Kantor</p> <p>54. Peralatan kantor</p>   |

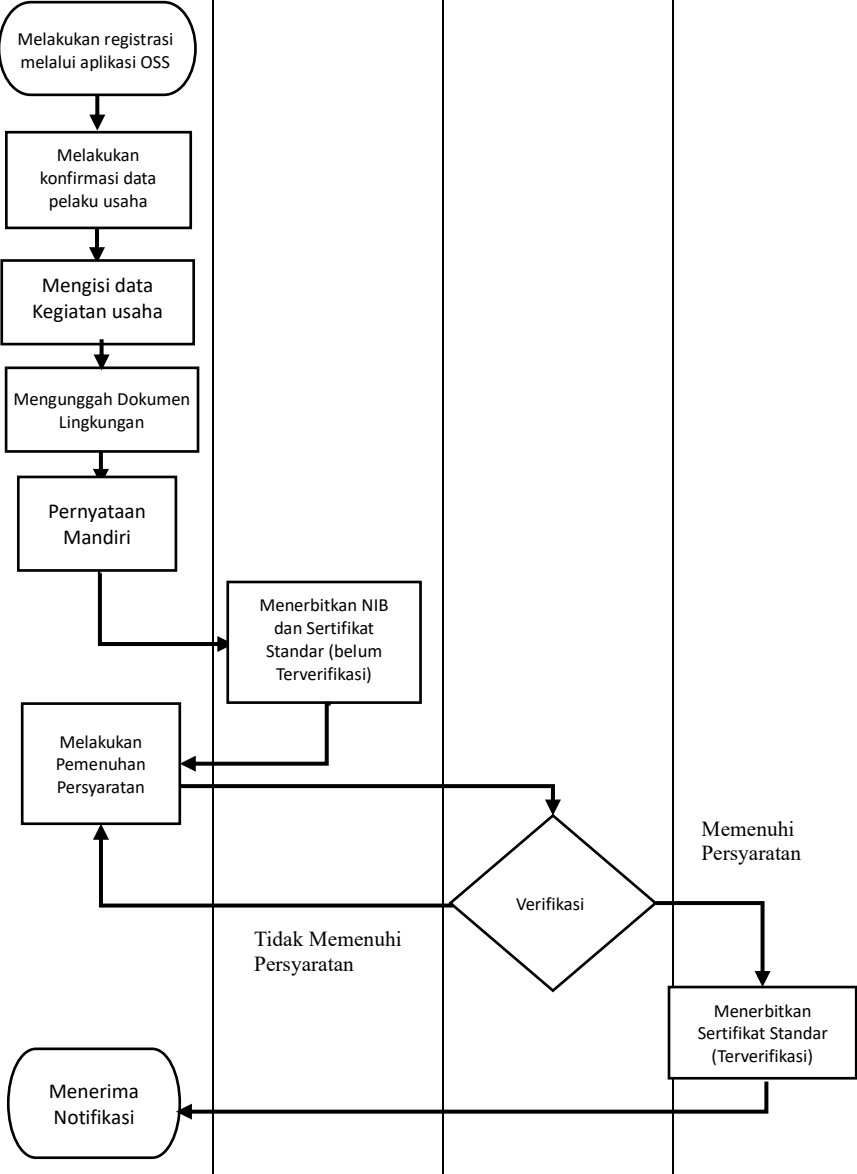
| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 55. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>56. Almari dokumen<br>57. Telepon<br>58. Mobil dan sepeda motor dinas<br>59. Meja dan kursi<br>60. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 33. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>34. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>35. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>36. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>37. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>38. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>39. Mampu mengoperasikan OSS.<br>40. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 9. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>10. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>i. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>j. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 9. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>10. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 41. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>42. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>43. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>44. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>45. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>46. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>47. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>48. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>49. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>50. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>9. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>10. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p> |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Tinggi) Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)**

| NO                               | KOMPONEN                          | URAIAN  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan             | <p>16.Data pelaku usaha;</p> <p>17.Data kegiatan usaha;</p> <p>18.Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i>.</p>   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon      | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS  | DPMPTSP/BKPM |                                   |            |              |  |  |  |  |
|                                  |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D[Mengunggah Dokumen Lingkungan]     D --&gt; E[Pernyataan Mandiri]     E --&gt; F[Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (belum Terverifikasi)]     F --&gt; G[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     G --&gt; H{Verifikasi}     H -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; G     H -- Memenuhi Persyaratan --&gt; I[Menerbitkan Sertifikat Standar (Terverifikasi)]     I --&gt; J([Menerima Notifikasi]) </pre>   |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>51. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>52. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>53. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>54. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>55. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>56. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>57. Website: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>58. Email : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>59. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>60. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 91. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>92. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>93. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>94. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>95. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>96. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>97. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>98. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>99. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>100. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>101. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>102. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>104. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>106. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>107. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>108. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>61. Internet</p> <p>62. Aplikasi OSS</p> <p>63. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>64. <i>Touchscreen</i></p> <p>65. Alat Tulis Kantor</p> <p>66. Peralatan kantor</p> <p>67. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>68. Almari dokumen</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 69. Telepon<br>70. Mobil dan sepeda motor dinas<br>71. Meja dan kursi<br>72. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 41. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>42. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>43. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>44. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>45. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>46. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>47. Mampu mengoperasikan OSS.<br>48. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 11. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>12. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>k. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>l. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 11. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>12. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 51. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>52. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>53. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>54. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>55. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>56. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>57. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>58. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>59. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>60. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

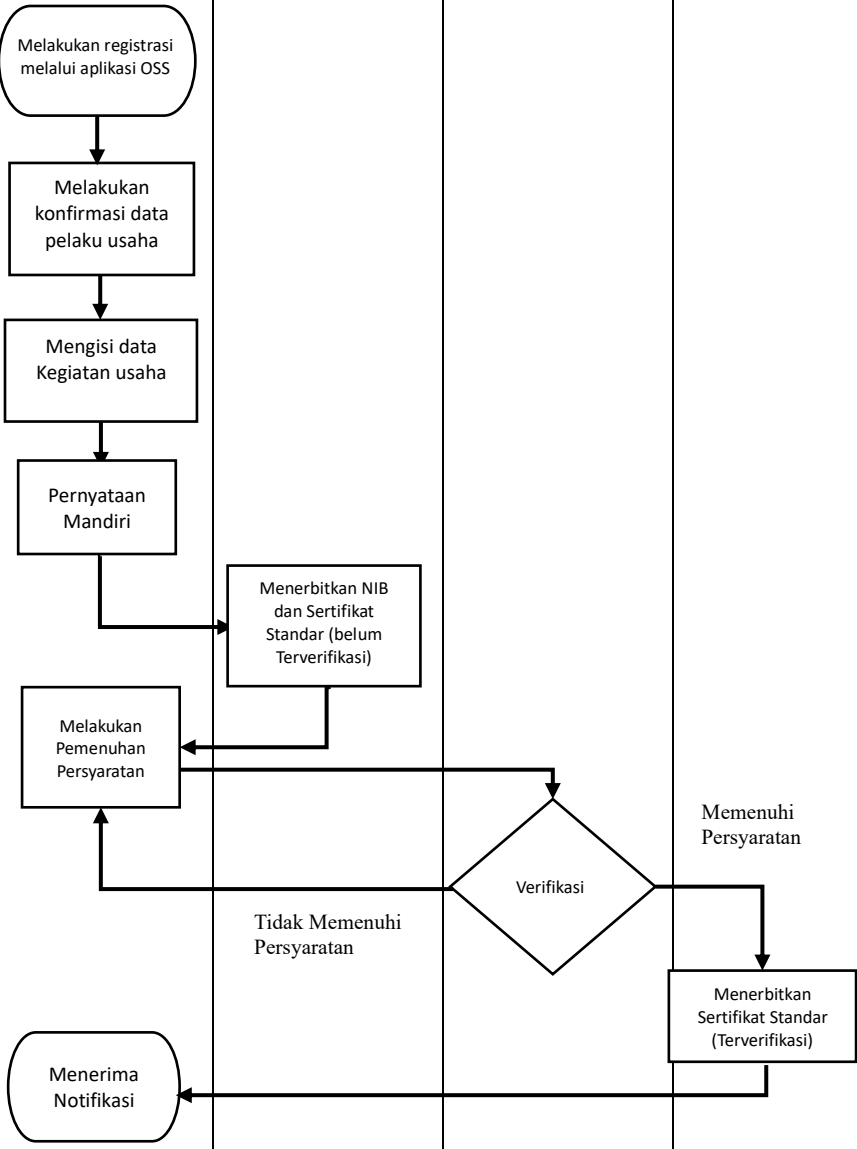
| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 11. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>12. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Tinggi) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)

| NO                               | KOMPONEN                          | URAIAN  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan             | 19.Data pelaku usaha;<br>20.Data kegiatan usaha;<br>21. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .  |              |                                   |            |              |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon      | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS  | DPMPTSP/BKPM |                                   |            |              |  |  |  |  |
|                                  |                                   |   |              |                                   |            |              |  |  |  |  |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D[Pernyataan Mandiri]     D --&gt; E[Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (belum Terverifikasi)]     E --&gt; F[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     F --&gt; G{Verifikasi}     G -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; F     G -- Memenuhi Persyaratan --&gt; H[Menerbitkan Sertifikat Standar (Terverifikasi)]     H --&gt; I([Menerima Notifikasi]) </pre>   |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>61. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>62. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>63. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>64. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>65. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>66. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>67. Website: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>68. Email : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>69. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>70. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 109. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>110. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>111. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>112. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>113. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>114. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>115. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>116. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>117. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>118. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>119. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>120. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>121. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>122. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>123. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>124. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>125. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>126. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>73. Internet</p> <p>74. Aplikasi OSS</p> <p>75. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>76. <i>Touchscreen</i></p> <p>77. Alat Tulis Kantor</p> <p>78. Peralatan kantor</p> <p>79. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>80. Almari dokumen</p>   |

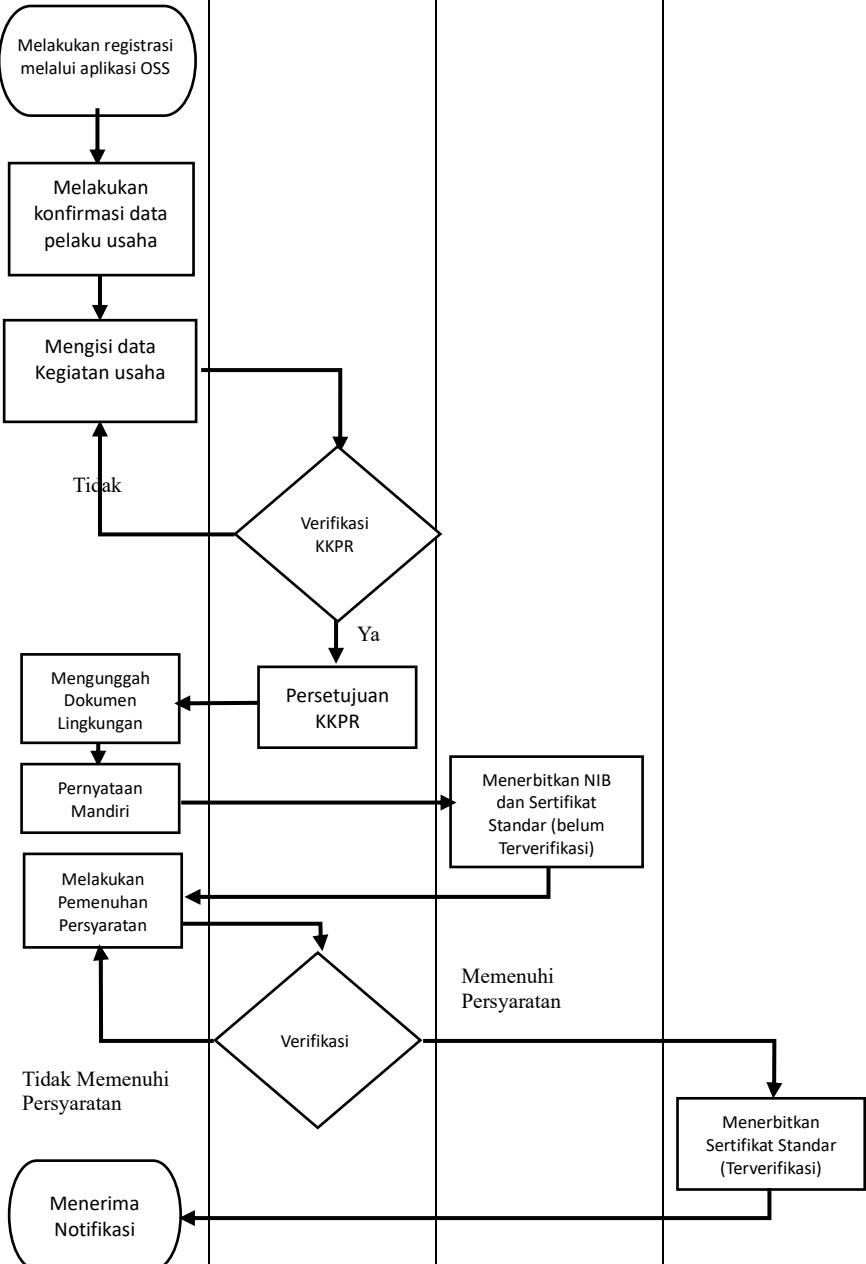
| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 81. Telepon<br>82. Mobil dan sepeda motor dinas<br>83. Meja dan kursi<br>84. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 49. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>50. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>51. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>52. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>53. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>54. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>55. Mampu mengoperasikan OSS.<br>56. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 13. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>14. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>m. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>n. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 13. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>14. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 61. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>62. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>63. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>64. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>65. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>66. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>67. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>68. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>69. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>70. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN   |
|----|----------|--|
|    |          | <p>13. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>14. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p> |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Tinggi) Wajib Dokumen Lingkungan (Non UMK)**

| NO                               | KOMPONEN                          | URAIAN   |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                   |  |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan             | <p>22.Data pelaku usaha;</p> <p>23.Data kegiatan usaha;</p> <p>24. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i>.</p>   |               |                                   |            |               |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> <th>DPMPTSP/ BKPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon       | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS | DPMPTSP/ BKPM |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS   | DPMPTSP/ BKPM |                                   |            |               |  |  |  |  |
|                                  |                                   |  |               |                                   |            |               |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     E --&gt; F[Mengunggah Dokumen Lingkungan]     F --&gt; G[Pernyataan Mandiri]     G --&gt; H[Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (belum Terverifikasi)]     H --&gt; I[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     I --&gt; J{Verifikasi}     J -- Memenuhi Persyaratan --&gt; K[Menerbitkan Sertifikat Standar (Terverifikasi)]     J -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; I     D -- Tidak --&gt; C     K --&gt; L([Menerima Notifikasi])   </pre>        |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>71. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>72. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>73. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>74. Twiter : @dpmpstpkpri</li> <li>75. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</li> <li>76. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>77. Website: dpmpstsp.kepriprov.go.id</li> <li>78. Email : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></li> <li>79. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></li> <li>80. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 127. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan   |

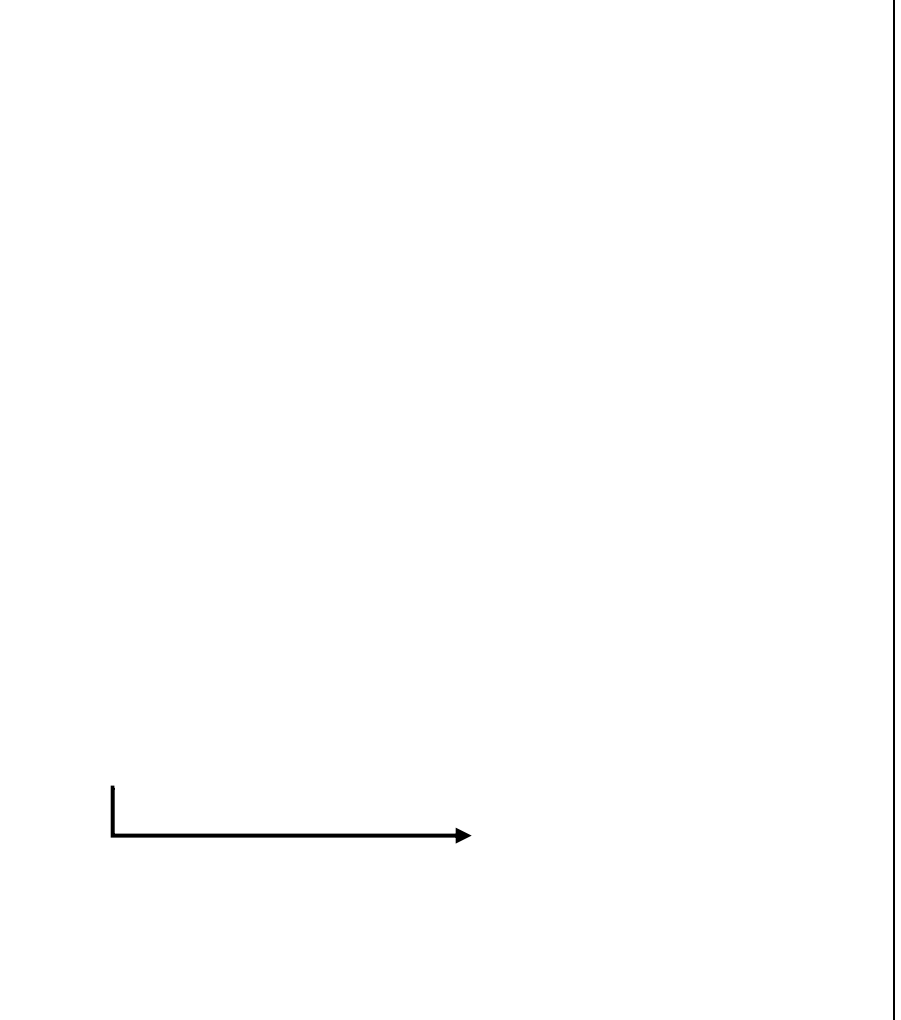
| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Informasi Publik</p> <p>128. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>129. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>130. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>131. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>132. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>133. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>134. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>135. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>136. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>137. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>138. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>139. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>140. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>141. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>142. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>143. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>144. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>85. Internet</p> <p>86. Aplikasi OSS</p> <p>87. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>88. <i>Touchscreen</i></p> <p>89. Alat Tulis Kantor</p> <p>90. Peralatan kantor</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 91. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>92. Almari dokumen<br>93. Telepon<br>94. Mobil dan sepeda motor dinas<br>95. Meja dan kursi<br>96. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 57. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>58. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>59. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>60. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>61. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>62. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>63. Mampu mengoperasikan OSS.<br>64. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 15. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>16. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>o. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>p. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 15. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>16. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 71. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>72. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>73. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>74. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>75. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>76. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>77. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>78. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>79. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>80. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN   |
|----|----------|--|
|    |          | <p>15. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>16. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p> |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Tinggi) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (Non UMK)

| NO   | KOMPONEN                        | URAIAN   |   |                   |                      |
|--|---------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>   |                                 |  |   |                   |                      |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan           | <p>25.Data pelaku usaha;</p> <p>26.Data kegiatan usaha;</p> <p>27. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i>.</p> |   |                   |                      |
| 2.   | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <b>Pemohon</b>   | <b>Kementerian Teknis/OPD Teknis/BKPM</b> | <b>Sistem OSS</b> | <b>DPMPTSP/ BKPM</b> |
|  |                                 |  |   |                   |                      |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  | <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     D -- Tidak --&gt; C     E --&gt; F[Pernyataan Mandiri]     F --&gt; G[Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (belum Terverifikasi)]     G --&gt; H{Verifikasi}     H -- Memenuhi Persyaratan --&gt; I[Menerbitkan Sertifikat Standar (Terverifikasi)]     H -- Tidak Memenuhi Persyaratan --&gt; J[Melakukan Pemenuhan Persyaratan]     J --&gt; H     I --&gt; K([Menerima Notifikasi])   </pre>  |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko   |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>81. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>82. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>83. Telepon: 0811 777 2197</li> <li>84. Twiter : @dpmpstpkpri</li> <li>85. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</li> <li>86. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>87. Website: dpmpstsp.kepriprov.go.id</li> <li>88. Email : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></li> <li>89. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></li> <li>90. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 145. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Informasi Publik</p> <p>146. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>147. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>148. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>149. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>150. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>151. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>152. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>153. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>154. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>155. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>156. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>157. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>158. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>159. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>160. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>161. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>162. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>97. Internet</p> <p>98. Aplikasi OSS</p> <p>99. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>100. <i>Touchscreen</i></p> <p>101. Alat Tulis Kantor</p> <p>102. Peralatan kantor</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 103. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>104. Almari dokumen<br>105. Telepon<br>106. Mobil dan sepeda motor dinas<br>107. Meja dan kursi<br>108. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 65. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>66. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>67. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>68. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>69. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>70. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>71. Mampu mengoperasikan OSS.<br>72. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 17. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>18. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>q. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>r. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 17. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>18. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 81. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>82. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>83. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>84. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>85. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>86. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>87. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>88. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>89. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>90. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 17. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>18. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Rendah) Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)**

| NO   | KOMPONEN  | URAIAN   |         |            |  |   |  |  |
|--|---|--|---------|------------|--|---|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>   |   |  |         |            |  |   |  |  |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan   | 28. Data pelaku usaha;<br>29. Data kegiatan usaha;<br>30. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .   |         |            |  |   |  |  |
| 2.   | Sistem, mekanisme, dan prosedur   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Pemohon</th> <th style="width: 50%;">Sistem OSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan konfirmasi data pelaku usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengisi data kegiatan usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengunggah Dokumen Lingkungan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pernyataan Mandiri</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">Menerima Notifikasi</div> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon | Sistem OSS | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan konfirmasi data pelaku usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengisi data kegiatan usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengunggah Dokumen Lingkungan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pernyataan Mandiri</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar</div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">Menerima Notifikasi</div> |  |
| Pemohon  | Sistem OSS  |  |         |            |  |   |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Melakukan konfirmasi data pelaku usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengisi data kegiatan usaha</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mengunggah Dokumen Lingkungan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Pernyataan Mandiri</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar</div> |  |         |            |  |   |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;">Menerima Notifikasi</div>   |   |  |         |            |  |   |  |  |
| 3.   | Jangka waktu penyelesaian   | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   |         |            |  |   |  |  |
| 4.   | Biaya/tarif   | Tidak dipungut biaya   |         |            |  |   |  |  |
| 5.   | Produk pelayanan  | NIB dan Sertifikat Standar   |         |            |  |   |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>91. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>92. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>93. Telepon: 0811 777 2197<br>94. Twiter : @dpmpstspkepri<br>95. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri<br>96. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>97. Website: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>98. Email : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>99. Youtube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>100. e-lapor: lapor.go.id  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 163. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>164. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>165. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>166. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>167. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan<br>168. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>169. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>170. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>171. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>172. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>173. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>174. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>175. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>176. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara<br>177. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>178. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | <p>Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>179. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>180. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas      | <p>109. Internet</p> <p>110. Aplikasi OSS</p> <p>111. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>112. <i>Touchscreen</i></p> <p>113. Alat Tulis Kantor</p> <p>114. Peralatan kantor</p> <p>115. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>116. Almari dokumen</p> <p>117. Telepon</p> <p>118. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>119. Meja dan kursi</p> <p>120. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | <p>73. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>74. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>75. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>76. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>77. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>78. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>79. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>80. Mampu bekerja dalam tim</p>  |
| 4. | Pengawasan internal                        | <p>19. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>20. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>s. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>t. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | <p>19. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)</p> <p>20. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>91. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>92. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>93. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p>   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 94. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>95. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>96. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>97. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>98. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>99. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>100. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>19. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>20. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruh unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Rendah) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (UMK)**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 31. Data pelaku usaha;<br>32. Data kegiatan usaha;<br>33. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> . |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |            |
|-------------------------------|--|---|------------|
|                               |  | Pemohon   | Sistem OSS |
| 2.                            | Sistem, mekanisme, dan prosedur          | <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data kegiatan usaha dan pernyataan mandiri kegiatan usaha]     C --&gt; D[Penerbitan NIB dan Sertifikat Standar]     D --&gt; E([Menerima Notifikasi]) </pre>   |            |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  |            |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya  |            |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar  |            |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>101. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>102. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>103. telepon: 0811 777 2197</li> <li>104. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>105. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>106. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>107. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>108. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>109. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>110. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |            |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |            |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>181. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>182. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>183. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>184. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> </ol>  |            |



| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>185. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>186. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>187. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>188. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>189. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>190. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>191. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>192. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>193. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>194. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>195. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>196. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>197. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>198. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>121. Internet</p> <p>122. Aplikasi OSS</p> <p>123. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>124. <i>Touchscreen</i></p> <p>125. Alat Tulis Kantor</p> <p>126. Peralatan kantor</p> <p>127. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>128. Almari dokumen</p> <p>129. Telepon</p> <p>130. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>131. Meja dan kursi</p> <p>132. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                  | <p>81. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>82. Sekretaris : Minimal Sarjana</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 83. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>84. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>85. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>86. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>87. Mampu mengoperasikan OSS.<br>88. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 21. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>22. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>u. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>v. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 21. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>22. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 101. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>102. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>103. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>104. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>105. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>106. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>107. Semua transaksi pembayaran PNBSP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>108. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>109. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>110. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>21. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>22. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Rendah) Wajib Dokumen Lingkungan (non UMK)**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |         |                                   |            |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|---------|-----------------------------------|------------|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |         |                                   |            |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 34. Data pelaku usaha;<br>35. Data kegiatan usaha;<br>36. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .  |         |                                   |            |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur          | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pemohon</th> <th style="text-align: center;">Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th style="text-align: center;">Sistem OSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> </td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS |  |  |  |
| Pemohon                          | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM        | Sistem OSS  |         |                                   |            |  |  |  |
|                                  |  |   |         |                                   |            |  |  |  |
| 3.                               | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  |         |                                   |            |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya  |         |                                   |            |  |  |  |
| 5.                               | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar  |         |                                   |            |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>111. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |         |                                   |            |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN    | URAIAN  |
|-------------------------------|-------------|---|
|                               |             | 112. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>113.<br>elepon: 0811 777 2197<br>114. Twiter : @dpmptspkepri<br>115. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>116. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>117.<br>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>118.<br>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>119.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>120. e-lapor: lapor.go.id  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |             |   |
| 1.                            | Dasar Hukum | 199. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>200. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>201. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>202. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>203. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan<br>204. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>205. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>206. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>207. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>208. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>209. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>210. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>211. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>212. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara<br>213. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>214. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>215. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>216. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>133. Internet</p> <p>134. Aplikasi OSS</p> <p>135. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>136. <i>Touchscreen</i></p> <p>137. Alat Tulis Kantor</p> <p>138. Peralatan kantor</p> <p>139. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>140. Almari dokumen</p> <p>141. Telepon</p> <p>142. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>143. Meja dan kursi</p> <p>144. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                  | <p>89. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>90. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>91. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>92. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>93. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>94. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>95. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>96. Mampu bekerja dalam tim</p>   |
| 4. | Pengawasan internal                   | <p>23. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>24. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah pelaksana                      | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>w. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>x. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan pelayanan                     | <p>23. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)</p> <p>24. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan keamanan dan                  | <p>111. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p>   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    | keselamatan pelayanan      | 112. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>113. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>114. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>115. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>116. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>117. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>118. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>119. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>120. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>23. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>24. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Resiko Menengah Rendah) Tidak Wajib Dokumen Lingkungan (non UMK)**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 37.Data pelaku usaha;<br>38.Data kegiatan usaha;<br>39.Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> . |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |                                   |            |
|----|--|---|-----------------------------------|------------|
|    |  | Pemohon   | Kemeterian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          | <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Tidak --&gt; C     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     E --&gt; F[Pernyataan Mandiri]     F --&gt; G[Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar]     G --&gt; H([Menerima Notifikasi]) </pre>  |                                   |            |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  |                                   |            |
| 4. | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya  |                                   |            |
| 5. | Produk pelayanan                         | NIB dan Sertifikat Standar  |                                   |            |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>121. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>122. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>123. telepon: 0811 777 2197</li> <li>124. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>125. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>126. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>127. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>128. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>129. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>130. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |                                   |            |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>217. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>218. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>219. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>220. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>221. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>222. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>223. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>224. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>225. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>226. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>227. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>228. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>229. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>230. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>231. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>232. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>233. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>234. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>145. Internet</p> <p>146. Aplikasi OSS</p> <p>147. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>148. <i>Touchscreen</i></p>  |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 149. Alat Tulis Kantor<br>150. Peralatan kantor<br>151. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>152. Almari dokumen<br>153. Telepon<br>154. Mobil dan sepeda motor dinas<br>155. Meja dan kursi<br>156. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 97. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>98. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>99. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>100. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>101. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>102. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>103. Mampu mengoperasikan OSS.<br>104. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 25. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>26. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>y. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>z. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 25. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>26. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 121. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>122. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>123. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>124. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>125. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>126. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>127. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>128. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>129. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 130. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya  |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>25. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>26. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sesuai KBLI (Beresiko Rendah)  
Untuk Non UMK

| NO                               | KOMPONEN                           | URAIAN   |         |                                    |            |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                    |  |         |                                    |            |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan              | 40. Data pelaku usaha;<br>41. Data kegiatan usaha;<br>42. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .                       |         |                                    |            |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Kementerian Teknis/OPD Teknis/BKPM</th> <th>Sistem OSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon | Kementerian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS |  |  |  |
| Pemohon                          | Kementerian Teknis/OPD Teknis/BKPM | Sistem OSS   |         |                                    |            |  |  |  |
|                                  |                                    |  |         |                                    |            |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
|                               |  | <pre> graph TD     A([Melakukan registrasi melalui aplikasi OSS]) --&gt; B[Melakukan konfirmasi data pelaku usaha]     B --&gt; C[Mengisi data Kegiatan usaha]     C --&gt; D{Verifikasi KKPR}     D -- Ya --&gt; E[Persetujuan KKPR]     D -- Tidak --&gt; C     E --&gt; F[Upload Dokumen Lingkungan]     F --&gt; G[Pernyataan Mandiri]     G --&gt; H[Menerbitkan NIB]     H --&gt; I([Menerima Notifikasi])   </pre>   |
| 3.                            | Jangka waktu penyelesaian                | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko  |
| 4.                            | Biaya/tarif                              | Tidak dipungut biaya  |
| 5.                            | Produk pelayanan                         | NIB   |
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>131. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>132. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>133. telepon: 0811 777 2197</li> <li>134. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>135. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>136. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>137. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>138. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>139. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>140. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 235. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>236. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>237. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>238. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>239. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan</p> <p>240. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>241. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>242. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>243. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>244. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>245. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>246. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>247. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>248. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara</p> <p>249. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>250. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>251. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>252. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>157. Internet</p> <p>158. Aplikasi OSS</p> <p>159. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>160. <i>Touchscreen</i></p> <p>161. Alat Tulis Kantor</p> <p>162. Peralatan kantor</p> <p>163. <i>front-office, Ruang back-office, Ruang Rapat</i></p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 164. Almari dokumen<br>165. Telepon<br>166. Mobil dan sepeda motor dinas<br>167. Meja dan kursi<br>168. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 105. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>106. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>107. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>108. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>109. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>110. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>111. Mampu mengoperasikan OSS.<br>112. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan internal                        | 27. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>28. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>aa. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>bb. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 27. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan ( Inspektorat)<br>28. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 131. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>132. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>133. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>134. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>135. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>136. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>137. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>138. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>139. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>140. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>27. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>28. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh seluruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Pelayanan Berusaha Non KBLI (Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha/PB-UMKU)

| NO   | KOMPONEN   | URAIAN  |                                     |            |            |             |  |  |                   |                                     |
|--|--|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>   |  |   |                                     |            |            |             |  |  |                   |                                     |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan  | 43. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>44. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>45. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>46. NPWP bagi usaha badan hukum;<br>47. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>48. Hak akses OSS berupa <i>username</i> dan <i>password</i> yang diperoleh setelah mendaftarkan di <i>oss.go.id</i> .   |                                     |            |            |             |  |  |                   |                                     |
| 2.   | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Sistem OSS</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Ka. DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Masuk ke account OSS</p> <p>Mengajukan Permohonan PB-UMKU</p> <p>Melakukan pemenuhan persyaratan</p> <p>Menerima Produk Layanan</p> </td> <td> <p>Screening Permohonan PB-UMKU</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> </td> <td> <p>Verifikasi</p> </td> <td> <p>Ya</p> <p>Penerbitan PB-UMKU</p> </td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon                             | Sistem OSS | OPD Teknis | Ka. DPMPTSP | <p>Masuk ke account OSS</p> <p>Mengajukan Permohonan PB-UMKU</p> <p>Melakukan pemenuhan persyaratan</p> <p>Menerima Produk Layanan</p> | <p>Screening Permohonan PB-UMKU</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> | <p>Verifikasi</p> | <p>Ya</p> <p>Penerbitan PB-UMKU</p> |
| Pemohon  | Sistem OSS   | OPD Teknis  | Ka. DPMPTSP                         |            |            |             |  |  |                   |                                     |
| <p>Masuk ke account OSS</p> <p>Mengajukan Permohonan PB-UMKU</p> <p>Melakukan pemenuhan persyaratan</p> <p>Menerima Produk Layanan</p> | <p>Screening Permohonan PB-UMKU</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> | <p>Verifikasi</p>   | <p>Ya</p> <p>Penerbitan PB-UMKU</p> |            |            |             |  |  |                   |                                     |
| 3.   | Jangka Waktu Penyelesaian                                      | Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  |                                     |            |            |             |  |  |                   |                                     |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Tidak dipungut biaya   |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Dokumen Perizinan Berusaha   |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>141. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>142. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>143.<br/>elepon: 0811 777 2197</p> <p>144. Twiter : @dpmptspkepri</p> <p>145. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</p> <p>146. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>147.<br/>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</p> <p>148.<br/>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></p> <p>149.<br/>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></p> <p>150. e-lapor: lapor.go.id</p>  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>253. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>254. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>255. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>256. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>257. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p> <p>258. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>259. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>260. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>261. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar perseroan serta Pendaftaran Pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil</p> <p>262. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>263. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>264. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>265. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>266. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan</p> <p>267. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>268. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p> |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Bidang Pertanian</p> <p>269. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian</p> <p>270. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>271. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>272. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan</p> <p>273. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perkeretaapian</p> <p>274. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggnaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>275. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja</p> <p>276. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan</p> <p>277. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan</p> <p>278. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah</p> <p>279. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian</p> <p>280. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>281. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>282. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p>283. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>284. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>285. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>286. Peraturan teknis di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, dan tenaga kerja</p> <p>287. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>288. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>289. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>169. Internet</p> <p>170. Aplikasi OSS</p> <p>171. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>172. <i>Touchscreen</i></p> <p>173. Alat Tulis Kantor</p> <p>174. Peralatan kantor</p>   |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 175. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>176. Almari dokumen<br>177. Telepon<br>178. Mobil dan sepeda motor dinas<br>179. Meja dan kursi<br>180. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 1. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>2. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>3. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>4. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>5. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>6. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku<br>7. Mampu mengoperasikan OSS.<br>8. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 29. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>30. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>cc. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>dd. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 29. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>30. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 141. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>142. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>143. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>144. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>145. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>146. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>147. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>148. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>149. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>150. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN   |
|----|----------|--|
|    |          | <p>29. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>30. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p> |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Persetujuan Rencana Pengoprasian Kapal

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | <p>49. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);</p> <p>50. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);</p> <p>51. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;</p> <p>52. NPWP bagi usaha badan hukum;</p> <p>53. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;</p> <p>54. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i></p> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                |
|----|--|---|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          |   |              |   |            |                |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                |
| 5. | Produk Pelayanan                         | SK Persetujuan Rencana Pengoprasian Kapal   |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>151. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>152. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>153. telepon: 0811 777 2197</li> <li>154. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>155. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>156. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>157. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>158. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>159. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>160. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>290. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>291. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>292. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>293. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>294. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>295. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>296. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>297. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>298. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>299. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>300. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>301. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>302. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>303. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>304. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>305. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pelabuhan</p> <p>306. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>307. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>181. Internet</p> <p>182. Aplikasi Perizinan</p> <p>183. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>184. <i>Touchscreen</i></p> <p>185. Alat Tulis Kantor</p> <p>186. Peralatan kantor</p> <p>187. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>188. Almari dokumen</p> <p>189. Telepon</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 190. Mobil dan sepeda motor dinas<br>191. Meja dan kursi<br>192. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 113. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>114. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>115. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>116. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>117. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>118. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>119. Mampu mengoperasikan OSS.<br>120. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 31. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>32. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ee. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ff. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 31. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>32. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 151. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>152. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>153. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>154. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>155. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>156. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>157. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>158. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>159. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>160. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>31. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>32. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Izin Sementara Pengoprasian Kapal Penyebrangan**

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 55.Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>56.Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>57.Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>58.NPWP bagi usaha badan hukum;<br>59.NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>60.Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPSTP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                    | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  | OPD Teknis | Kepala DPMPSTP |   |            |                |  |  |  |  |  |
|                                  |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka waktu penyelesaian       | 18 Hari Kerja  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/tarif                     | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk pelayanan                | Izin Sementara Pengoprasian Kapal Penyebrangan   |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 6.                            | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>161. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>162. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>163.<br>elepon: 0811 777 2197<br>164. Twiter : @dpmptspkepri<br>165. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>166. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>167.<br>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>168.<br>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>169.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>170. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 308. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>309. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>310. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>311. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>312. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>313. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>314. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>315. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran<br>316. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan<br>317. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>318. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap<br>319. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>320. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>321. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>322. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>323. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pelabuhan<br>324. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>325. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>   |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas      | <p>193. Internet</p> <p>194. Aplikasi Perizinan</p> <p>195. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>196. <i>Touchscreen</i></p> <p>197. Alat Tulis Kantor</p> <p>198. Peralatan kantor</p> <p>199. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>200. Almari dokumen</p> <p>201. Telepon</p> <p>202. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>203. Meja dan kursi</p> <p>204. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>                            |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | <p>121. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>122. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>123. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>124. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>125. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>126. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>127. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>128. Mampu bekerja dalam tim</p> |
| 4. | Pengawasan internal                        | <p>33. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>34. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>gg. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>hh. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | <p>33. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>34. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatsapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>161. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>162. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>163. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>164. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>165. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p>              |



| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 166. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>167. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>168. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>169. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>170. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya                                  |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>33. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>34. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Izin Pengoprasian Kapal Penyebrangan

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 61. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>62. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>63. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>64. NPWP bagi usaha badan hukum;<br>65. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>66. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                |
|----|--|---|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          |   |              |   |            |                |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                |
| 5. | Produk pelayanan                         | Izin Pengoprasian Kapal Penyebrangan  |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>171. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>172. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>173. telepon: 0811 777 2197</li> <li>174. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>175. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>176. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>177. ebsite: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a></li> <li>178. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>179. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>180. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a></li> </ol> |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>326. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>327. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>328. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>329. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>330. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>331. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>332. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>333. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>334. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p> <p>335. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>336. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>337. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>338. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>339. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>340. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>341. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan Pelabuhan</p> <p>342. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>343. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>205. Internet</p> <p>206. Aplikasi Perizinan</p> <p>207. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>208. <i>Touchscreen</i></p> <p>209. Alat Tulis Kantor</p> <p>210. Peralatan kantor</p> <p>211. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>212. Almari dokumen</p> <p>213. Telepon</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 214. Mobil dan sepeda motor dinas<br>215. Meja dan kursi<br>216. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 129. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>130. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>131. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>132. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>133. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>134. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>135. Mampu mengoperasikan OSS.<br>136. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 35. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>36. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ii. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>jj. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 35. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>36. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 171. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>172. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>173. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>174. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>175. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>176. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>177. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>178. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>179. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>180. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>35. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>36. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Persetujuan Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus**

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 67.Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>68.Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>69.Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>70.NPWP bagi usaha badan hukum;<br>71.NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>72.Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPSTP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                    | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  | OPD Teknis | Kepala DPMPSTP |   |            |                |  |  |  |  |  |
|                                  |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian       | 18 Hari Kerja  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                     | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                | SK Persetujuan Penambahan Kuota Angkutan Sewa Khusus   |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>181. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>182. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>183.<br>elepon: 0811 777 2197<br>184. Twiter : @dpmpstspkepri<br>185. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri<br>186. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>187.<br>ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>188.<br>mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>189.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>190. e-lapor: lapor.go.id  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 344. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>345. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>346. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>347. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>348. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>349. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>350. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>351. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br>352. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>353. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>354. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>355. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>356. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.<br>357. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>358. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>359. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 217. Internet<br>218. Aplikasi Perizinan<br>219. Komputer, Printer, Scanner<br>220. <i>Touchscreen</i><br>221. Alat Tulis Kantor<br>222. Peralatan kantor<br>223. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>224. Almari dokumen<br>225. Telepon<br>226. Mobil dan sepeda motor dinas<br>227. Meja dan kursi<br>228. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 137. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>138. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>139. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>140. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>141. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>142. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>143. Mampu mengoperasikan OSS.<br>144. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 37. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>38. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>kk. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ll. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 37. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>38. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 181. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>182. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>183. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>184. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>185. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>186. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>187. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>188. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 189. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>190. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya  |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>37. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>38. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Persetujuan Angkutan Sewa Khusus

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 73. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>74. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>75. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>76. NPWP bagi usaha badan hukum;<br>77. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>78. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |



| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                |
|----|--|---|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          |   |              |   |            |                |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                |
| 5. | Produk Pelayanan                         | SK Persetujuan Angkutan Sewa Khusus   |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>191. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>192. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>193. telepon: 0811 777 2197</li> <li>194. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>195. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>196. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>197. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>198. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>199. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>200. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 360. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>361. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>362. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>363. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>364. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>365. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>366. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>367. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br>368. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>369. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>370. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>371. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>372. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.<br>373. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>374. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>375. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | 229. Internet<br>230. Aplikasi Perizinan<br>231. Komputer, Printer, Scanner<br>232. <i>Touchscreen</i><br>233. Alat Tulis Kantor<br>234. Peralatan kantor<br>235. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>236. Almari dokumen<br>237. Telepon<br>238. Mobil dan sepeda motor dinas<br>239. Meja dan kursi<br>240. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3.                            | Kompetensi Pelaksana                  | 145. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana<br>146. Sekretaris : Minimal Sarjana  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>147. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>148. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>149. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>150. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>151. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>152. Mampu bekerja dalam tim</p>   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>39. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>40. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>mm. etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>nn. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>39. Pelayanan DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>40. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>191. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>192. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>193. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>194. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>195. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>196. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>197. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>198. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas</p> <p>199. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>200. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>39. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>40. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>  |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta**

| NO   | KOMPONEN   | URAIAN  |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------|---|------------|-----------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------|--|----------------------|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>                             |  |   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 1.   | Persyaratan Pelayanan  | 79. Data identitas sekolah;<br>80. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i>  |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 2.   | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Registrasi SiJempol</p> <p>Mengajukan Permohonan Izin</p> </td> <td> <p>Persetujuan &amp; Validasi</p> <p>Verifikasi</p> <p>Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</p> <p>Menyusun draft izin</p> <p>Proses Penomoran Izin</p> <p>Mencetak Izin</p> </td> <td> <p>Persetujuan</p> <p>Verifikasi</p> <p>Verifikasi</p> </td> <td> <p>Verifikasi</p> </td> <td> <p>Verifikasi</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>Penolakan/Perbaikan</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p> </td> <td> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> </td> <td> <p>Ya</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> </td> <td> <p>Ya</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p>Menerima Izin</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon                              | Front Office      | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPSTSP | <p>Registrasi SiJempol</p> <p>Mengajukan Permohonan Izin</p> | <p>Persetujuan &amp; Validasi</p> <p>Verifikasi</p> <p>Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</p> <p>Menyusun draft izin</p> <p>Proses Penomoran Izin</p> <p>Mencetak Izin</p> | <p>Persetujuan</p> <p>Verifikasi</p> <p>Verifikasi</p> | <p>Verifikasi</p> | <p>Verifikasi</p> |  | <p>Penolakan/Perbaikan</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p> | <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> | <p>Ya</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> | <p>Ya</p> |  | <p>Menerima Izin</p> |  |  |  |
| Pemohon  | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan   | OPD Teknis                           | Kepala DPMPSTSP   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| <p>Registrasi SiJempol</p> <p>Mengajukan Permohonan Izin</p> | <p>Persetujuan &amp; Validasi</p> <p>Verifikasi</p> <p>Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</p> <p>Menyusun draft izin</p> <p>Proses Penomoran Izin</p> <p>Mencetak Izin</p> | <p>Persetujuan</p> <p>Verifikasi</p> <p>Verifikasi</p>  | <p>Verifikasi</p>                    | <p>Verifikasi</p> |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
|  | <p>Penolakan/Perbaikan</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p> <p>Tidak</p>  | <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p>   | <p>Ya</p> <p>Penolakan/Perbaikan</p> | <p>Ya</p>         |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
|  | <p>Menerima Izin</p>   |   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 3.   | Jangka Waktu Penyelesaian  | 18 Hari Kerja   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 4.   | Biaya/Tarif  | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 5.   | Produk Pelayanan   | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |
| 6.   | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan   | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>201. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>202. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>203. elepon: 0811 777 2197<br>204. Twiter : @dpmpstspepri   |                                      |                   |   |            |                 |  |  |  |                   |                   |  |   |   |                                      |           |  |                      |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|                               |                                       | 205. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>206. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>207. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>208. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>209. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>210. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 376. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>377. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>378. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>379. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>380. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>381. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>382. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>383. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan<br>384. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>385. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>386. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>387. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>388. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.<br>389. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>390. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan<br>391. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>392. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | 241. Internet<br>242. Aplikasi Perizinan<br>243. Komputer, Printer, Scanner  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 244. <i>Touchscreen</i><br>245. Alat Tulis Kantor<br>246. Peralatan kantor<br>247. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>248. Almari dokumen<br>249. Telepon<br>250. Mobil dan sepeda motor dinas<br>251. Meja dan kursi<br>252. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 153. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>154. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>155. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>156. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>157. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>158. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>159. Mampu mengoperasikan OSS.<br>160. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 41. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>42. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>oo. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>pp. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 41. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>42. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 201. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>202. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>203. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>204. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>205. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>206. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>207. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>208. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>209. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>210. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 41. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>42. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh seluruh unit kerja. |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta**

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 81. Data identitas sekolah<br>82. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i>  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon    | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                    | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |   |            |                |  |  |  |  |  |
|                                  |                                 |  |            |                |   |            |                |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta   |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>211. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>212. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>213. telepon: 0811 777 2197</p> <p>214. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>215. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>216. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>217. website: dpmpstsp.kepriprov.go.id</p> <p>218. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> <p>219. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a></p> <p>220. e-lapor: lapor.go.id</p>  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>393. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>394. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>395. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>396. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>397. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>398. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>399. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>400. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>401. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>402. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>403. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>404. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>405. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>406. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>407. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>408. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>409. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>                         |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | <p>253. Internet</p> <p>254. Aplikasi Perizinan</p> <p>255. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>256. <i>Touchscreen</i></p> <p>257. Alat Tulis Kantor</p> <p>258. Peralatan kantor</p> <p>259. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>260. Almari dokumen</p> <p>261. Telepon</p> <p>262. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>263. Meja dan kursi</p> <p>264. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>                            |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | <p>161. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>162. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>163. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>164. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>165. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>166. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>167. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>168. Mampu bekerja dalam tim</p> |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>43. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>44. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>qq. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>rr. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>43. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>44. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>211. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>212. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>213. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>214. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p>   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 215. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>216. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>217. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>218. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>219. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>220. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>43. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>44. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 83. Data Identitas Sekolah<br>84. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                |
|----|--|---|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          |   |              |   |            |                |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                |
| 5. | Produk Pelayanan                         | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus   |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>221. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>222. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>223. telepon: 0811 777 2197</li> <li>224. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>225. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>226. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>227. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>228. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>229. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>230. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>410. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>411. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>412. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>413. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>414. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>415. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>416. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>417. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>418. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>419. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>420. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>421. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>422. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>423. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>424. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>425. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>426. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>265. Internet</p> <p>266. Aplikasi Perizinan</p> <p>267. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>268. <i>Touchscreen</i></p> <p>269. Alat Tulis Kantor</p> <p>270. Peralatan kantor</p> <p>271. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>272. Almari dokumen</p> <p>273. Telepon</p> <p>274. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>275. Meja dan kursi</p> <p>276. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 169. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>170. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>171. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>172. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>173. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>174. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>175. Mampu mengoperasikan OSS.<br>176. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 45. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>46. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ss. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>tt. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 45. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>46. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 221. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>222. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>223. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>224. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>225. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>226. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>227. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>228. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>229. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>230. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>45. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>46. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|-----------------|---|------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 85.Data identitas sekolah<br>86.Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i>  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                      | Pemohon    | Front Office    | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPSTSP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  | OPD Teknis | Kepala DPMPSTSP |   |            |                 |  |  |  |  |  |
|                                  |  |  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>231. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>232. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>233. elepon: 0811 777 2197<br>234. Twiter : @dpmpstspkepri |            |                 |   |            |                 |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|                               |                                       | 235. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>236. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>237.<br>ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>238.<br>mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>239.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>240. e-lapor: lapor.go.id  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 427. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>428. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>429. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>430. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>431. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>432. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>433. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>434. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan<br>435. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>436. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>437. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>438. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>439. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.<br>440. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>441. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan<br>442. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>443. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | 277. Internet<br>278. Aplikasi Perizinan<br>279. Komputer, Printer, Scanner<br>280. <i>Touchscreen</i>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 281. Alat Tulis Kantor<br>282. Peralatan kantor<br>283. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>284. Almari dokumen<br>285. Telepon<br>286. Mobil dan sepeda motor dinas<br>287. Meja dan kursi<br>288. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 177. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>178. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>179. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>180. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>181. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>182. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>183. Mampu mengoperasikan OSS.<br>184. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 47. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>48. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>uu. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>vv. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 47. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>48. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 231. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>232. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>233. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>234. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>235. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>236. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>237. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>238. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>239. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>240. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |



| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 47. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>48. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**

| NO  | KOMPONEN   | URAIAN   |   |  |   |            |                |   |  |   |   |  |
|---|--|--|---|--|---|------------|----------------|---|--|---|---|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>  |  |  |   |  |   |            |                |   |  |   |   |  |
| 1.  | Persyaratan Pelayanan  | 87. Data identitas sekolah<br>88. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i>  |   |  |   |            |                |   |  |   |   |  |
| 2.  | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</th> <th>OPD Teknis</th> <th>Kepala DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">Registrasi SiJempol</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Mengajukan Permohonan Izin</div> </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan &amp; Validasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses Penomoran Izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mencetak Izin</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">Menerima Izin</div> </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> </td> <td> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Flowchart description: The process starts with 'Registrasi SiJempol' leading to 'Mengajukan Permohonan Izin'. It then goes to 'Front Office' for 'Persetujuan &amp; Validasi' and 'Verifikasi'. A 'Verifikasi' decision diamond leads to 'Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis' (if 'Ya') or back to 'Mengajukan Permohonan Izin' (if 'Tidak'). From 'Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis', it goes to 'Koordinator' for 'Persetujuan'. A 'Persetujuan' decision diamond leads to 'Menyusun draft izin' (if 'Ya') or back to 'Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis' (if 'Tidak'). From 'Menyusun draft izin', it goes to 'OPD Teknis' for 'Verifikasi'. A 'Verifikasi' decision diamond leads to 'Proses Penomoran Izin' (if 'Ya') or back to 'Menyusun draft izin' (if 'Tidak'). From 'Proses Penomoran Izin', it goes to 'Kepala DPMPTSP' for 'Verifikasi'. A 'Verifikasi' decision diamond leads to 'Mencetak Izin' (if 'Ya') or back to 'Proses Penomoran Izin' (if 'Tidak'). Finally, 'Mencetak Izin' leads to 'Menerima Izin'.</i></p> | Pemohon   | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">Registrasi SiJempol</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Mengajukan Permohonan Izin</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan &amp; Validasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses Penomoran Izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mencetak Izin</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">Menerima Izin</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> |
| Pemohon   | Front Office   | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  | OPD Teknis  | Kepala DPMPTSP   |   |            |                |   |  |   |   |  |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">Registrasi SiJempol</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Mengajukan Permohonan Izin</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan &amp; Validasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Menyusun draft izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Proses Penomoran Izin</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Mencetak Izin</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">Menerima Izin</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Peretujuan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Verifikasi</div> |   |            |                |   |  |   |   |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>241. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>242. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>243. telepon: 0811 777 2197</p> <p>244. Twiter : @dpmpstpkpri</p> <p>245. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</p> <p>246. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>247. ebsite: dpmpstp.kepriprov.go.id</p> <p>248. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></p> <p>249. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></p> <p>250. e-lapor: lapor.go.id</p>   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>444. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>445. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>446. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>447. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>448. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>449. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>450. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>451. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>452. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>453. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>454. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>455. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>456. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>457. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>458. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018</p> |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>459. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>460. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | <p>289. Internet</p> <p>290. Aplikasi Perizinan</p> <p>291. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>292. <i>Touchscreen</i></p> <p>293. Alat Tulis Kantor</p> <p>294. Peralatan kantor</p> <p>295. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>296. Almari dokumen</p> <p>297. Telepon</p> <p>298. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>299. Meja dan kursi</p> <p>300. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | <p>185. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>186. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>187. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>188. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>189. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>190. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>191. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>192. Mampu bekerja dalam tim</p>                   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>49. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>50. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>ww. etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>xx. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>49. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>50. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>241. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>242. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>243. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>244. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p>   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 245. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>246. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>247. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>248. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>249. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>250. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>49. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>50. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruk unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Luasan Maksimal 5 Ha Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Kegiatan Yang Bersifat Non Komersial**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 89. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>90. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>91. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>92. NPWP bagi usaha badan hukum;<br>93. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>94. Hak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                 |
|----|--|---|--------------|---|------------|-----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPSTSP |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          |   |              |   |            |                 |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                 |
| 4. | Biaya/tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                 |
| 5. | Produk pelayanan                         | SK Perseetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Luasan Maksimal 5 Ha Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Kegiatan Yang Bersifat Non Komersial  |              |   |            |                 |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>251. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>252. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>253. telepon: 0811 777 2197<br>254. Twiter : @dpmptspkepri<br>255. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>256. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>257. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>258. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>259. |              |   |            |                 |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |                                       | outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>260. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 461. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>462. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>463. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>464. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>465. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>466. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>467. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>468. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>469. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<br>470. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>471. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>472. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>473. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>474. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>475. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial<br>476. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi<br>477. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>478. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>479. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>480. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | 301. Internet<br>302. Aplikasi Perizinan<br>303. Komputer, Printer, Scanner<br>304. <i>Touchscreen</i>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 305. Alat Tulis Kantor<br>306. Peralatan kantor<br>307. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>308. Almari dokumen<br>309. Telepon<br>310. Mobil dan sepeda motor dinas<br>311. Meja dan kursi<br>312. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 193. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>194. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>195. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>196. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>197. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>198. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>199. Mampu mengoperasikan OSS.<br>200. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 51. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>52. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>yy. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>zz. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 51. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>52. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 251. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>252. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>253. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>254. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>255. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>256. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>257. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>258. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>259. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>260. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 51. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>52. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Persetujuan Lingkungan

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 95. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);<br>96. Nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);<br>97. Akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;<br>98. NPWP bagi usaha badan hukum;<br>99. NIB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;<br>100.<br>ak akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i> |



| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |   |            |                |
|----|--|---|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon   | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          | <pre> graph TD     A(Registrasi Sijempol) --&gt; B[Mengajukan Permohonan Izin]     B --&gt; C[Persewaan &amp; Validasi]     C --&gt; D{Verifikasi}     D --&gt; E[Menyusun draft Permohonan Rekomendasi Teknis]     E --&gt; F{Persewaan}     F -- Ya --&gt; G{Verifikasi}     F -- Tidak --&gt; H[Penolakan/Perbaikan]     H --&gt; E     G --&gt; I[Proses Penomoran Izin]     I --&gt; J[Mencetak Izin]     J --&gt; K(Menerima Izin)     I --&gt; L{Verifikasi}     L -- Ya --&gt; K     L -- Tidak --&gt; I </pre>   |              |   |            |                |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |   |            |                |
| 5. | Produk pelayanan                         | SK Persewaan Lingkungan   |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>261. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>262. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>263. telepon: 0811 777 2197</li> <li>264. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>265. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>266. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>267. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>268. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>269. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>270. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>481. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>482. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>483. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>484. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>485. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>486. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>487. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>488. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>489. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>490. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>491. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>492. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>493. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>494. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>495. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</p> <p>496. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <p>497. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>498. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>499. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>500. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>313. Internet</p> <p>314. Aplikasi Perizinan</p> <p>315. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>316. <i>Touchscreen</i></p> <p>317. Alat Tulis Kantor</p> <p>318. Peralatan kantor</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 319. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>320. Almari dokumen<br>321. Telepon<br>322. Mobil dan sepeda motor dinas<br>323. Meja dan kursi<br>324. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 201. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>202. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>203. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>204. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>205. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>206. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>207. Mampu mengoperasikan OSS.<br>208. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 53. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>54. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>aaa.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>bbb.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 53. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>54. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 261. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>262. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>263. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>264. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>265. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>266. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>267. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>268. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>269. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>270. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN   |
|----|----------|--|
|    |          | <p>53. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>54. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p> |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Luasan Maksimal 5 Ha Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Kegiatan Yang Bersifat Non Komersal**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | <p>101. nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);</p> <p>102. nomor Pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA);</p> <p>103. akta pendirian perusahaan bagi usaha badan hukum;</p> <p>104. PWP bagi usaha badan hukum;</p> <p>105. IB/sertifikat standar/izin pendirian perusahaan;</p> <p>106. kata akses SiJempol berupa <i>username</i> dan <i>password</i></p> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN   |              |   |            |                |
|----|--|--|--------------|---|------------|----------------|
|    |  | Pemohon  | Front Office | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | OPD Teknis | Kepala DPMPTSP |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur          |  |              |   |            |                |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |              |   |            |                |
| 4. | Biaya/tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |              |   |            |                |
| 5. | Produk pelayanan                         | SK Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan  |              |   |            |                |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>271. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>272. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>273.<br>telepon: 0811 777 2197<br>274. Twiter : @dpmptspkepri<br>275. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>276. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>277.<br>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>278.<br>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>279.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>280. e-lapor: lapor.go.id |              |   |            |                |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>501. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>502. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>503. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>504. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>505. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>506. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>507. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>508. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>509. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>510. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>511. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>512. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>513. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>514. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>515. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</p> <p>516. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <p>517. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>518. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>519. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>520. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2.                            | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>325. Internet</p> <p>326. Aplikasi Perizinan</p> <p>327. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>328. <i>Touchscreen</i></p> <p>329. Alat Tulis Kantor</p> <p>330. Peralatan kantor</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 331. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>332. Almari dokumen<br>333. Telepon<br>334. Mobil dan sepeda motor dinas<br>335. Meja dan kursi<br>336. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi pelaksana                       | 209. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>210. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>211. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>212. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>213. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>214. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>215. Mampu mengoperasikan OSS.<br>216. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan internal                        | 55. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>56. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ccc.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ddd.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan pelayanan                          | 55. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>56. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 271. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>272. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>273. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>274. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>275. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>276. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>277. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>278. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>279. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>280. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 55. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>56. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Layak Operasi Sementara Pengguna Kelong

| NO                                       | KOMPONEN  | URAIAN   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|--|---|--|------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|--|---|---|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|----|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>         |   |  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 1.                                       | Persyaratan Pelayanan   | 107. Form Non Perizinan<br>108. Persyaratan Non Perizinan<br>109. urat kuasa (jika diwakilkan)   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 2.                                       | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> </td> <td> <p>Kajian Teknis/ Survey</p> </td> <td> <p>Persetujuan</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon                      | Front Office       | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Kajian Teknis/ Survey</p> | <p>Persetujuan</p> |  |  |  |  | Ya |  |  |  |  | Tidak |  |  |  |  | Tidak |  |  |  |  | Ya |  |  |  |  | Tidak |  |  |  |  | Ya |
| Pemohon                                  | Front Office  | Back Office  | Tim Teknis                   | Pimpinan DPMPTSP   |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p>  | <p>Kajian Teknis/ Survey</p> | <p>Persetujuan</p> |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Ya                 |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Tidak              |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Tidak              |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Ya                 |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Tidak              |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
|  |   |  |                              | Ya                 |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 3.                                       | Jangka Waktu Penyelesaian   | 18 Hari Kerja  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 4.                                       | Biaya/Tarif   | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 5.                                       | Produk Pelayanan  | Rekomendasi Layak Operasi sementara pengguna kelong  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |
| 6.                                       | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan                          | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>281. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>282. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>283.   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |       |  |  |  |  |    |



| NO                            | KOMPONEN    | URAIAN   |
|-------------------------------|-------------|--|
|                               |             | <p>elepon: 0811 777 2197</p> <p>284. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>285. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>286. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>287.</p> <p>ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id</p> <p>288.</p> <p>mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> <p>289.</p> <p>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a></p> <p>290. e-lapor: lapor.go.id</p>   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |             |  |
| 1.                            | Dasar Hukum | <p>521. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>522. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>523. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>524. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>525. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>526. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>527. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>528. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>529. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>530. Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesianomor 57/permen-kp/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.30/men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia</p> <p>531. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor <u>3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015</u> tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda</p> <p>532. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>533. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>534. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>535. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>536. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 537. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.   |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 337. Internet<br>338. Aplikasi Non Perizinan<br>339. Komputer, Printer, Scanner<br>340. <i>Touchscreen</i><br>341. Alat Tulis Kantor<br>342. Peralatan kantor<br>343. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>344. Almari dokumen<br>345. Telepon<br>346. Mobil dan sepeda motor dinas<br>347. Meja dan kursi<br>348. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 217. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>218. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>219. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>220. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>221. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>222. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>223. Mampu mengoperasikan OSS.<br>224. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 57. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>58. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>eee.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>fff. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 57. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>58. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 281. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>282. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>283. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>284. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>285. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>286. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 287.Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>288.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>289.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>290.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya   |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>57. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>58. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 110. Form Non Perizinan<br>111. Persyaratan Non Perizinan<br>112. Surat kuasa (jika diwakilkan)  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur | <pre> graph TD     subgraph Pemohon         P1(Permohonan)         P2(Menerima Produk)     end     subgraph FrontOffice         FO1{Verifikas Berkas}         FO2[Menyerahkan Dokumen Izin/ Penolakan]     end     subgraph BackOffice         BO1{Verifikas Berkas}         BO2[Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan]         BO3[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/ Penolakan]     end     subgraph TimTeknis         TT[Kajian Teknis/ Survey]     end     subgraph PimpinanDPMPTSP         PD{Persetujuan}     end      P1 --&gt; FO1     FO1 -- Ya --&gt; BO1     FO1 -- Tidak --&gt; FO1     BO1 --&gt; TT     TT --&gt; BO2     BO2 --&gt; PD     PD -- Ya --&gt; BO3     PD -- Tidak --&gt; BO2     BO3 --&gt; FO2     FO2 --&gt; P2           </pre> |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|-------------------------------|--|--|
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 20 Hari Kerja  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | SK Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>291. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>292. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>293.<br/>elepon: 0811 777 2197</p> <p>294. Twiter : @dpmpptskepri</p> <p>295. Instagram : @dpmpptsprovinsikepri</p> <p>296. Facebook: DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>297.<br/>ebsite: dpmpptskepriprov.go.id</p> <p>298.<br/>mail : <a href="mailto:dpmpptskepri20@gmail.com">dpmpptskepri20@gmail.com</a></p> <p>299.<br/>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpptskepri">https://www.youtube.com/@dpmpptskepri</a></p> <p>300. e-lapor: lapor.go.id</p>   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>538. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>539. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>540. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>541. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>542. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>543. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>544. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>545. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>546. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>547. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>548. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>549. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>550. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut</p> <p>551. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>552. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | Provinsi Kepulauan Riau<br>553. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 349. Internet<br>350. Aplikasi Non Perizinan<br>351. Komputer, Printer, Scanner<br>352. <i>Touchscreen</i><br>353. Alat Tulis Kantor<br>354. Peralatan kantor<br>355. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>356. Almari dokumen<br>357. Telepon<br>358. Mobil dan sepeda motor dinas<br>359. Meja dan kursi<br>360. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan                                      |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 225. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>226. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>227. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>228. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>229. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>230. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>231. Mampu mengoperasikan OSS.<br>232. Mampu bekerja dalam tim |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 59. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>60. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ggg.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>hhh.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 59. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>60. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 291. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>292. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>293. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>294. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>295. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan  |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 296. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>297. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>298. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>299. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>300. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya                                  |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>59. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>60. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 113. Form Non Perizinan<br>114. Persyaratan Non Perizinan<br>115. urat kuasa (jika diwakilkan) |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon  | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          |  |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 32 Hari Kerja  |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal   |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>301. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>302. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>303. telepon: 0811 777 2197<br>304. Twiter : @dpmptspkepri<br>305. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>306. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>307. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>308. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>309. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>310. e-lapor: lapor.go.id |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 554. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>555. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>556. Undang-Undang Nomor <u>39 Tahun 2014</u> tentang Perkebunan<br>557. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>558. Undang-Undang Nomor <u>22 Tahun 2019</u> tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>559. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>560. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>561. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>562. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>563. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>564. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>565. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>566. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>567. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>568. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>569. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>361. Internet</p> <p>362. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>363. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>364. <i>Touchscreen</i></p> <p>365. Alat Tulis Kantor</p> <p>366. Peralatan kantor</p> <p>367. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>368. Almari dokumen</p> <p>369. Telepon</p> <p>370. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>371. Meja dan kursi</p> <p>372. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>233. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>234. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>235. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>236. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>237. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>238. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>239. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>240. Mampu bekerja dalam tim</p>  |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
| 4. | Pengawasan Internal                        | 61. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>62. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>iii. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>jjj. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 61. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>62. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 301.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>302.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>303.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>304.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>305.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>306.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>307.Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>308.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>309.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>310.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>61. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>62. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Penetapan Areal Kerja PPKH di atas 5 Ha

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 116. Form Non Perizinan<br>117. Persyaratan Non Perizinan<br>118.<br>urat kuasa (jika diwakilkan) |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon   | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <pre> graph TD     A([Permohonan]) --&gt; B{Verifikas Berkas}     B -- Ya --&gt; C{Verifikas Berkas}     B -- Tidak --&gt; C     C -- Ya --&gt; D[Kajian Teknis/Survey]     D --&gt; E[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]     E --&gt; F{Persetujuan}     F -- Ya --&gt; G[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     F -- Tidak --&gt; E     G --&gt; H[Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan]     H --&gt; I([Menerima Produk]) </pre>  |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 5 Hari Kerja  |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Penetapan areal kerja PPKH di atas 5 Ha   |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>311. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>312. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>313. telepon: 0811 777 2197</li> <li>314. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>315. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>316. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>317. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>318. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>319. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>320. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>570. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>571. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>572. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>573. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan</li> </ol>  |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>574. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>575. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>576. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>577. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>578. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>579. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>580. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>581. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p> <p>582. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>583. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P. 5 /VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur</p> <p>584. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>585. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>586. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>373. Internet</p> <p>374. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>375. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>376. <i>Touchscreen</i></p> <p>377. Alat Tulis Kantor</p> <p>378. Peralatan kantor</p> <p>379. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>380. Almari dokumen</p> <p>381. Telepon</p> <p>382. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>383. Meja dan kursi</p> <p>384. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>241. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>242. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>243. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>244. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>Sarjana</p> <p>245. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>246. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>247. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>248. Mampu bekerja dalam tim</p>  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>63. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>64. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>kkk.</p> <p>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>III. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>63. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>64. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>311. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>312. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>313. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>314. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>315. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>316. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>317. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>318. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas</p> <p>319. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>320. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>63. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>64. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Persetujuan Pinjam Kawasan Hutan

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 119. Form Non Perizinan<br>120. Persyaratan Non Perizinan<br>121. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 5 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Persetujuan Pinjam Kawasan Hutan   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>321. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>322. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>323. telepon: 0811 777 2197</p> <p>324. Twiter : @dpmpstpkpri</p> <p>325. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</p> <p>326. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>327. ebsite: dpmpstp.kepriprov.go.id</p> <p>328. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></p> <p>329. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></p> <p>330. e-lapor: lapor.go.id</p> |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Dasar Hukum                              | 587. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>588. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>589. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>590. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>591. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>592. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>593. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>594. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>595. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>596. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>597. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>598. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p> <p>599. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>600. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P. 5 /VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur</p> <p>601. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>602. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>603. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>385. Internet</p> <p>386. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>387. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>388. <i>Touchscreen</i></p> <p>389. Alat Tulis Kantor</p> <p>390. Peralatan kantor</p> <p>391. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>392. Almari dokumen</p> <p>393. Telepon</p> <p>394. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>395. Meja dan kursi</p> <p>396. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | <p>249. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>250. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>251. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>252. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>253. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>254. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>255. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>256. Mampu bekerja dalam tim</p>   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>65. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>66. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>mmm.<br/>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>nnn.<br/>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>65. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>66. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatsapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>321. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>322. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>323. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>324. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>325. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>326. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>327. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>328. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas</p> <p>329. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>330. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>65. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>66. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>   |

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Pencairan Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca tambang**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 122. Form Non Perizinan<br>123. Persyaratan Non Perizinan<br>124. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 15 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Pencairan Dana Jaminan Reklamasi Dan Dana Jaminan Pasca tambang  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>331. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>332. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>333. telepon: 0811 777 2197</p> <p>334. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>335. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>336. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>337. ebsite: <a href="http://dpmpstsp.kepriprov.go.id">dpmpstsp.kepriprov.go.id</a></p> <p>338. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |



| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
|                               |                                       | 339.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>340. e-lapor: lapor.go.id  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 604. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>605. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>606. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>607. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>608. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>609. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>610. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>611. Peraturan Pemerintah Nomor <u>96 Tahun 2021</u> tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>612. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>613. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>614. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>615. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>616. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>617. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara<br>618. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>619. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>620. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | 397. Internet<br>398. Aplikasi Non Perizinan<br>399. Komputer, Printer, Scanner<br>400. <i>Touchscreen</i><br>401. Alat Tulis Kantor<br>402. Peralatan kantor<br>403. <i>front-office, Ruang back-office, Ruang Rapat</i>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 404. Almari dokumen<br>405. Telepon<br>406. Mobil dan sepeda motor dinas<br>407. Meja dan kursi<br>408. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 257. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>258. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>259. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>260. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>261. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>262. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>263. Mampu mengoperasikan OSS.<br>264. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 67. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>68. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ooo.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ppp.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 67. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>68. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 331. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>332. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>333. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>334. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>335. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>336. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>337. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>338. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>339. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>340. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 67. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>68. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Jaminan Kesungguhan Eksplorasi

| NO                                       | KOMPONEN  | URAIAN   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
|--|---|--|------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|--|---|---|------------------------------|--------------------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b>         |   |  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 1.                                       | Persyaratan Pelayanan   | 125. Form Non Perizinan<br>126. Persyaratan Non Perizinan<br>127. urat kuasa (jika diwakilkan)   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 2.                                       | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> </td> <td> <p>Kajian Teknis/ Survey</p> </td> <td> <p>Persetujuan</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Flowchart description: The process starts with 'Permohonan' (Request) in the Front Office. It leads to a decision 'Verifikas Berkas'. If 'Ya' (Yes), it goes to 'Verifikas Berkas' in the Back Office. If 'Tidak' (No), it loops back to 'Verifikas Berkas' in the Front Office. From 'Verifikas Berkas' in the Back Office, it goes to 'Kajian Teknis/ Survey' in the Tim Teknis. This leads to 'Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan' in the Back Office. This process leads to a decision 'Persetujuan'. If 'Ya', it goes to 'Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan' in the Back Office, then to 'Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan' in the Front Office, and finally to 'Menerima Produk' in the Pemohon. If 'Tidak', it loops back to 'Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan'.</p> | Pemohon                      | Front Office       | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Kajian Teknis/ Survey</p> | <p>Persetujuan</p> |
| Pemohon                                  | Front Office  | Back Office  | Tim Teknis                   | Pimpinan DPMPTSP   |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| <p>Permohonan</p> <p>Menerima Produk</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p>  | <p>Kajian Teknis/ Survey</p> | <p>Persetujuan</p> |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 3.                                       | Jangka Waktu Penyelesaian   | 15 Hari Kerja  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 4.                                       | Biaya/Tarif   | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 5.                                       | Produk Pelayanan  | Rekomendasi Pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |
| 6.                                       | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan                          | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>341. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>342. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>343.   |                              |                    |             |            |                  |  |   |   |                              |                    |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |                                       | <p>elepon: 0811 777 2197</p> <p>344. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>345. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>346. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>347.</p> <p>ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id</p> <p>348.</p> <p>mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> <p>349.</p> <p>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a></p> <p>350. e-lapor: lapor.go.id</p>  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | <p>621. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>622. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>623. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>624. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>625. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>626. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>627. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>628. Peraturan Pemerintah Nomor <u>96 Tahun 2021</u> tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>629. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>630. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>631. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>632. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>633. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>634. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>635. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>636. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>409. Internet</p> <p>410. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>411. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>412. <i>Touchscreen</i></p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 413. Alat Tulis Kantor<br>414. Peralatan kantor<br>415. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>416. Almari dokumen<br>417. Telepon<br>418. Mobil dan sepeda motor dinas<br>419. Meja dan kursi  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 265. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>266. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>267. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>268. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>269. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>270. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>271. Mampu mengoperasikan OSS.<br>272. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 69. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>70. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>qqq.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>rrr. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 69. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>70. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 341. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>342. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>343. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>344. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>345. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>346. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>347. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>348. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>349. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>350. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 69. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>70. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Persetujuan Program Kemitraan

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 128. Form Non Perizinan<br>129. Persyaratan Non Perizinan<br>130. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 15 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | SK Persetujuan Program Kemitraan   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>351. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>352. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>353. |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|                               |                                       | elepon: 0811 777 2197<br>354. Twiter : @dpmpstspkepri<br>355. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri<br>356. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>357.<br>ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>358.<br>mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>359.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>360. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |                                       |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                           | 637. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>638. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>639. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>640. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>641. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>642. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>643. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>644. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>645. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>646. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>647. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>648. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<br>649. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>650. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara<br>651. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>652. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau |
| 2.                            | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | 420. Internet<br>421. Aplikasi Non Perizinan<br>422. Komputer, Printer, Scanner<br>423. <i>Touchscreen</i>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 424. Alat Tulis Kantor<br>425. Peralatan kantor<br>426. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>427. Almari dokumen<br>428. Telepon<br>429. Mobil dan sepeda motor dinas<br>430. Meja dan kursi  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 273. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>274. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>275. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>276. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>277. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>278. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>279. Mampu mengoperasikan OSS.<br>280. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 71. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>72. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>sss.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ttt. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 71. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>72. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 351. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>352. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>353. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>354. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>355. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>356. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>357. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>358. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>359. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>360. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;  |



| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 71. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>72. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Untuk Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|----------------------------------|--|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 131. Form Non Perizinan<br>132. Persyaratan Non Perizinan<br>133. urat kuasa (jika diwakilkan)  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          |   |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 13 Hari Kerja   |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Untuk Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum   |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>361. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO                            | KOMPONEN    | URAIAN  |
|-------------------------------|-------------|---|
|                               |             | 362. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>363.<br>elepon: 0811 777 2197<br>364. Twiter : @dpmpstpkpri<br>365. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>366. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau<br>367.<br>ebsite: dpmpstp.kepriprov.go.id<br>368.<br>mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>369.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a><br>370. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |             |   |
| 1.                            | Dasar Hukum | 653. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>654. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>655. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>656. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>657. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>658. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik<br>659. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>660. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>661. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>662. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>663. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>664. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>665. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan<br>666. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>667. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>668. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | Terpadu Satu Pintu.   |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 431. Internet<br>432. Aplikasi Non Perizinan<br>433. Komputer, Printer, Scanner<br>434. <i>Touchscreen</i><br>435. Alat Tulis Kantor<br>436. Peralatan kantor<br>437. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>438. Almari dokumen<br>439. Telepon<br>440. Mobil dan sepeda motor dinas<br>441. Meja dan kursi<br>442. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 281. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>282. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>283. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>284. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>285. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>286. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>287. Mampu mengoperasikan OSS.<br>288. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 73. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>74. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>uuu.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>vvv.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 73. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>74. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 361. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>362. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>363. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>364. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>365. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>366. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>367. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> ) |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 368.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>369.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>370.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya   |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>73. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>74. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Pasar Tradisional

| NO                               | KOMPONEN                           | URAIAN   |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|---|--|-------------|--|--|--|--|-------|-----------------|------------------------------------|---|--|----|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                    |  |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan              | 134. Form Non Perizinan<br>135. Persyaratan Non Perizinan<br>136. urat kuasa (jika diwakilkan)   |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Permohonan</td> <td>Verifikas Berkas</td> <td>Verifikas Berkas</td> <td>Kajian Teknis/ Survey</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan</td> <td></td> <td>Persetujuan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Menerima Produk</td> <td>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</td> <td>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</td> <td></td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon               | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | Permohonan | Verifikas Berkas | Verifikas Berkas | Kajian Teknis/ Survey |  |  | Tidak |  |  |  |  |  | Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan |  | Persetujuan |  |  |  |  | Tidak | Menerima Produk | Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan | Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan |  | Ya |
| Pemohon                          | Front Office                       | Back Office  | Tim Teknis            | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| Permohonan                       | Verifikas Berkas                   | Verifikas Berkas   | Kajian Teknis/ Survey |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
|                                  | Tidak                              |  |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
|                                  |                                    | Proses Penerbitan Dokumen Izin/ Penolakan  |                       | Persetujuan      |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
|                                  |                                    |  |                       | Tidak            |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| Menerima Produk                  | Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan | Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan  |                       | Ya               |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian          | 18 Hari Kerja  |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |
| 4.                               | Biaya/Tarif                        | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |                       |                  |             |            |                  |            |                  |                  |                       |  |  |       |  |  |  |  |  |   |  |             |  |  |  |  |       |                 |                                    |   |  |    |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Pasar Tradisional   |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>371. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>372. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>373.<br/>elepon: 0811 777 2197</p> <p>374. Twiter : @dpmptspkepri</p> <p>375. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</p> <p>376. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>377.<br/>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</p> <p>378.<br/>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></p> <p>379.<br/>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></p> <p>380. e-lapor: lapor.go.id</p>  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>669. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>670. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>671. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>672. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>673. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>674. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>675. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>676. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>677. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</p> <p>678. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>679. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>680. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>681. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan antar Pulau</p> <p>682. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>683. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | Provinsi Kepulauan Riau<br>684. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 443. Internet<br>444. Aplikasi Non Perizinan<br>445. Komputer, Printer, Scanner<br>446. <i>Touchscreen</i><br>447. Alat Tulis Kantor<br>448. Peralatan kantor<br>449. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>450. Almari dokumen<br>451. Telepon<br>452. Mobil dan sepeda motor dinas<br>453. Meja dan kursi<br>454. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan                                      |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 289. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>290. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>291. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>292. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>293. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>294. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>295. Mampu mengoperasikan OSS.<br>296. Mampu bekerja dalam tim |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 75. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>76. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>www.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>xxx.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 75. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>76. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 371. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>372. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>373. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>374. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>375. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan  |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 376. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>377. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>378. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>379. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>380. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya                                  |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>75. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>76. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Registrasi Mesin Linting Rokok

| NO                               | KOMPONEN                        | URAIAN   |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                                 |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan           | 137. Form Non Perizinan<br>138. Persyaratan Non Perizinan<br>139. urut kuasa (jika diwakilkan)   |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur | <pre> graph TD     subgraph Front_Office [Front Office]         P(Permohonan) --&gt; V1{Verifikas Berkas}         M(Menerima Produk)     end     subgraph Back_Office [Back Office]         V2{Verifikas Berkas}         P1[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]         A[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     end     subgraph Tim_Teknis [Tim Teknis]         K[Kajian Teknis/Survey]     end     subgraph Pimpinan [Pimpinan DPMPTSP]         P2{Persetujuan}     end     V1 -- Ya --&gt; V2     V2 -- Ya --&gt; K     K --&gt; P1     P1 --&gt; P2     P2 -- Ya --&gt; A     P2 -- Tidak --&gt; P1     A --&gt; M     V1 -- Tidak --&gt; V2   </pre> |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Sertifikat Registrasi   |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>381. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>382. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>383. telepon: 0811 777 2197</p> <p>384. Twiter : @dpmptspkepri</p> <p>385. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</p> <p>386. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>387. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</p> <p>388. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></p> <p>389. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></p> <p>390. e-lapor: lapor.go.id</p>   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>685. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>686. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>687. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>688. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>689. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>690. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri</p> <p>691. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>692. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>693. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>694. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (rokok)</p> <p>695. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>696. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>697. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>698. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya</p> <p>699. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 700. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>701. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 455. Internet<br>456. Aplikasi Non Perizinan<br>457. Komputer, Printer, Scanner<br>458. <i>Touchscreen</i><br>459. Alat Tulis Kantor<br>460. Peralatan kantor<br>461. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>462. Almari dokumen<br>463. Telepon<br>464. Mobil dan sepeda motor dinas<br>465. Meja dan kursi<br>466. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan                                      |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 297. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>298. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>299. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>300. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>301. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>302. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>303. Mampu mengoperasikan OSS.<br>304. Mampu bekerja dalam tim |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 77. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>78. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>yyy.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>zzz.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 77. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>78. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 381. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>382. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>383. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>384. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 385. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>386. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>387. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>388. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>389. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>390. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>77. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>78. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi IUI (Ijin Usaha Industri)

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 140. Form Non Perizinan<br>141. Persyaratan Non Perizinan<br>142. urat kuasa (jika diwakilkan) |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon  | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <pre> graph TD     A([Permohonan]) --&gt; B{Verifikas Berkas}     B -- Ya --&gt; C{Verifikas Berkas}     B -- Tidak --&gt; C     C -- Ya --&gt; D[Kajian Teknis/Survey]     D --&gt; E[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]     E --&gt; F{Persetujuan}     F -- Ya --&gt; G[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     F -- Tidak --&gt; E     G --&gt; H[Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan]     H --&gt; I([Menerima Produk]) </pre>   |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi IUI (Ijin Usaha Industri)  |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>391. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>392. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>393. telepon: 0811 777 2197<br>394. Twiter : @dpmptspkepri<br>395. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>396. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>397. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>398. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>399. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>400. e-lapor: lapor.go.id |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 702. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>703. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>704. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>705. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan   |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>706. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>707. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri</p> <p>708. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>709. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>710. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>711. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>712. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>713. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>714. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya</p> <p>715. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>716. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>717. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>467. Internet</p> <p>468. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>469. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>470. <i>Touchscreen</i></p> <p>471. Alat Tulis Kantor</p> <p>472. Peralatan kantor</p> <p>473. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>474. Almari dokumen</p> <p>475. Telepon</p> <p>476. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>477. Meja dan kursi</p> <p>478. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>305. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>306. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>307. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>308. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>309. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>310. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>311. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>312. Mampu bekerja dalam tim</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
| 4. | Pengawasan Internal                        | 79. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>80. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>aaaa.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>bbbb.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 79. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>80. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 391.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>392.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>393.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>394.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>395.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>396.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>397.Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>398.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>399.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>400.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>79. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>80. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.  |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi SIUP-B2 (Bahan Berbahaya)

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 143. Form Non Perizinan<br>144. Persyaratan Non Perizinan<br>145.<br>urat kuasa (jika diwakilkan) |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon  | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <pre> graph TD     A([Permohonan]) --&gt; B{Verifikas Berkas}     B -- Ya --&gt; C{Verifikas Berkas}     B -- Tidak --&gt; C     C -- Ya --&gt; D[Kajian Teknis/Survey]     D --&gt; E[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]     F{Persetujuan} -- Ya --&gt; G[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     F -- Tidak --&gt; E     G --&gt; H[Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan]     H --&gt; I([Menerima Produk])   </pre>  |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 5 Hari Kerja   |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi SIUP-B2 (Bahan Berbahaya)  |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>401. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>402. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>403. telepon: 0811 777 2197<br>404. Twiter : @dpmptspkepri<br>405. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>406. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>407. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>408. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>409. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>410. e-lapor: lapor.go.id |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 718. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>719. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>720. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>721. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan   |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>722. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>723. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>724. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>725. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>726. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>727. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>728. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>729. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya</p> <p>730. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>731. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>732. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>479. Internet</p> <p>480. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>481. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>482. <i>Touchscreen</i></p> <p>483. Alat Tulis Kantor</p> <p>484. Peralatan kantor</p> <p>485. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>486. Almari dokumen</p> <p>487. Telepon</p> <p>488. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>489. Meja dan kursi</p> <p>490. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>313. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>314. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>315. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>316. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>317. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>318. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>319. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>320. Mampu bekerja dalam tim</p>  |
| 4. | Pengawasan Internal                   | <p>81. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>82. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>cccc.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>dddd.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 81. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>82. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 401. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>402. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>403. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>404. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>405. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>406. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>407. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>408. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>409. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>410. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>81. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>82. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Duty Free Shop (Toko Bebas Bea)**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 146. Form Non Perizinan<br>147. Persyaratan Non Perizinan<br>148.<br>urat kuasa (jika diwakilkan) |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon   | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          |   |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Duty Free Shop (Toko Bebas Bea)   |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>411. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>412. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>413. telepon: 0811 777 2197</li> <li>414. Twiter : @dpmptspkepri</li> <li>415. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</li> <li>416. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>417. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</li> <li>418. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></li> <li>419. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></li> <li>420. e-lapor: lapor.go.id</li> </ol> |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>733. Undang-Undang Nomor 17 Tahun · 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan</li> <li>734. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai</li> <li>735. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>736. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>737. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</li> </ol>  |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>738. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>739. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>740. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>741. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>742. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>743. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>744. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>745. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Toko Bebas Bea</p> <p>746. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>747. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-01/BC/2018 tentang Toko Bebas Bea</p> <p>748. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>749. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>750. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>491. Internet</p> <p>492. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>493. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>494. <i>Touchscreen</i></p> <p>495. Alat Tulis Kantor</p> <p>496. Peralatan kantor</p> <p>497. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>498. Almari dokumen</p> <p>499. Telepon</p> <p>500. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>501. Meja dan kursi</p> <p>502. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>321. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>322. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>323. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>324. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>325. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>326. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | terkait<br>327. Mampu mengoperasikan OSS.<br>328. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 83. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>84. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>eeee.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ffff. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 83. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>84. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 411. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>412. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>413. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>414. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>415. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>416. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>417. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>418. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>419. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>420. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>83. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>84. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi SIUP-MB (Minumal Beralkohol) Distributor**

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 149. Form Non Perizinan<br>150. Persyaratan Non Perizinan<br>151. |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
|                               |  | urat kuasa (jika diwakilkan)  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <pre> graph TD     subgraph Pemohon         A([Permohonan])         F([Menerima Produk])     end     subgraph FrontOffice         B{Verifikas Berkas}         G[Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan]     end     subgraph BackOffice         C{Verifikas Berkas}         D[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]         E[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     end     subgraph TimTeknis         H[Kajian Teknis/Survey]     end     subgraph PimpinanDPMPTSP         I{Persetujuan}     end      A --&gt; B     B -- Ya --&gt; C     C -- Ya --&gt; H     H --&gt; D     D --&gt; I     I -- Ya --&gt; E     I -- Tidak --&gt; D     E --&gt; G     G --&gt; F     B -- Tidak --&gt; B   </pre> |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja   |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar)  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>421. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>422. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>423. telepon: 0811 777 2197<br>424. Twiter : @dpmptspkepri<br>425. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>426. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>427. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>428. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>429. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>430. e-lapor: lapor.go.id                        |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 751. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>752. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>753. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang   |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>754. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>755. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>756. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>757. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>758. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>759. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>760. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>761. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>762. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Ketentuan pengadaan Bahan Berbahaya yang berasal dari Impor</p> <p>763. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>764. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>765. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>766. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>503. Internet</p> <p>504. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>505. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>506. <i>Touchscreen</i></p> <p>507. Alat Tulis Kantor</p> <p>508. Peralatan kantor</p> <p>509. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>510. Almari dokumen</p> <p>511. Telepon</p> <p>512. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>513. Meja dan kursi</p> <p>514. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>329. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>330. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>331. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>332. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>333. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 334. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>335. Mampu mengoperasikan OSS.<br>336. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 85. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>86. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>gggg.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>hhhh.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 85. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>86. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 421.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>422.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>423.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>424.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>425.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>426.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>427.Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>428.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>429.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>430.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>85. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>86. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar)

| NO                               | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------------|----------|--------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |          |        |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 1.                            | Persyaratan Pelayanan                    | 152. Form Non Perizinan<br>153. Persyaratan Non Perizinan<br>154. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                       | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>             |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi SIUP-PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>431. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>432. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>433. telepon: 0811 777 2197<br>434. Twiter : @dpmptspkepri<br>435. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>436. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>437. ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>438. mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>439. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>440. e-lapor: lapor.go.id |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 767. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>768. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>769. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>770. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>771. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>772. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>773. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>774. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>775. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>776. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>777. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>778. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan antar Pulau</p> <p>779. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>780. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>781. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>515. Internet</p> <p>516. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>517. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>518. <i>Touchscreen</i></p> <p>519. Alat Tulis Kantor</p> <p>520. Peralatan kantor</p> <p>521. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>522. Almari dokumen</p> <p>523. Telepon</p> <p>524. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>525. Meja dan kursi</p> <p>526. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>337. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana</p> <p>338. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>339. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>340. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>341. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>  |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 342. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>343. Mampu mengoperasikan OSS.<br>344. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 87. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>88. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>iiii. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>jjjj. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 87. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>88. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 431. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>432. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>433. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>434. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>435. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>436. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>437. Semua transaksi pembayaran PNBP dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>438. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>439. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>440. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>87. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>88. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.  |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 155. Form Non Perizinan<br>156. Persyaratan Non Perizinan |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                               |  | 157.<br>urat kuasa (jika diwakilkan)  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office      | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                       | Front Office                             | Back Office   | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|                               |  |   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 6 Hari Kerja  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | SK Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>441. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>442. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>443. telepon: 0811 777 2197</p> <p>444. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>445. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>446. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>447. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id</p> <p>448. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> <p>449. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a></p> <p>450. e-lapor: lapor.go.id</p> |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>782. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>783. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>784. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan</p>  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>785. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>786. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun</p> <p>787. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>788. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</p> <p>789. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>790. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>791. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>792. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>793. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>794. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian pemanfaatan Ruang Daerah</p> <p>795. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>796. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>797. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatat Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037</p> <p>798. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>799. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>800. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>527. Internet</p> <p>528. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>529. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>530. <i>Touchscreen</i></p> <p>531. Alat Tulis Kantor</p> <p>532. Peralatan kantor</p> <p>533. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>534. Almari dokumen</p> <p>535. Telepon</p> <p>536. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>537. Meja dan kursi</p> <p>538. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | 345. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 346. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>347. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>348. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>349. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>350. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>351. Mampu mengoperasikan OSS.<br>352. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 89. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>90. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>kkkk.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>llll. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 89. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>90. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 441. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>442. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>443. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>444. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>445. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>446. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>447. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>448. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>449. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>450. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>89. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>90. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Nama Pelayanan : Rekomendasi penetapan DLKR/ DLKP Pelabuhan Penyeberangan

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 158. Form Non Perizinan<br>159. Persyaratan Non Perizinan<br>160. urat kuasa (jika diwakilkan)  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office   | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 23 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi penetapan DLKR/ DLKP Pelabuhan Penyeberangan  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>451. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>452. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>453. telepon: 0811 777 2197<br>454. Twiter : @dpmpstpkpri<br>455. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>456. Facebook: DPMPSTP Provinsi Kepulauan Riau<br>457. ebsite: dpmpstp.kepriprov.go.id<br>458. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>459. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a><br>460. e-lapor: lapor.go.id |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum                           | <p>801. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>802. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>803. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>804. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>805. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>806. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>807. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>808. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>809. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>810. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>811. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>812. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>813. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>814. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>815. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>539. Internet</p> <p>540. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>541. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>542. <i>Touchscreen</i></p> <p>543. Alat Tulis Kantor</p> <p>544. Peralatan kantor</p> <p>545. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>546. Almari dokumen</p> <p>547. Telepon</p> <p>548. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>549. Meja dan kursi</p> <p>550. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>353. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>354. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>355. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>356. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>357. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>358. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>359. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>360. Mampu bekerja dalam tim</p>   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>91. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>92. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>mmmm.<br/>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>nnnn.<br/>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>91. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>92. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>451.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>452.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>453.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>454.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>455.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>456.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>457.Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>458.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas</p> <p>459.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>460.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>91. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>92. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 161. Form Non Perizinan<br>162. Persyaratan Non Perizinan<br>163. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | Pemohon    | Front Office      | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 23 Hari Kerja  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>461. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>462. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>463. telepon: 0811 777 2197<br>464. Twiter : @dpmpstspkepri<br>465. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri<br>466. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>467. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>468. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>469. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>470. e-lapor: lapor.go.id |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Dasar Hukum                              | 816. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |



| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>817. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>818. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>819. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>820. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>821. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>822. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>823. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>824. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>825. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>826. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>827. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>828. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>829. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>830. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>551. Internet</p> <p>552. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>553. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>554. <i>Touchscreen</i></p> <p>555. Alat Tulis Kantor</p> <p>556. Peralatan kantor</p> <p>557. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>558. Almari dokumen</p> <p>559. Telepon</p> <p>560. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>561. Meja dan kursi</p> <p>562. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>361. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>362. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>363. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>364. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>365. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | <p>366. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>367. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>368. Mampu bekerja dalam tim</p>   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>93. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>94. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>oooo.<br/>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>pppp.<br/>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>93. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>94. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>461.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>462.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>463.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>464.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>465.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>466.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>467.Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>468.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas</p> <p>469.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>470.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>93. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>94. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>  |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas di Jalan Provinsi**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 164. Form Non Perizinan<br>165. Persyaratan Non Perizinan<br>166. urat kuasa (jika diwakilkan)  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office      | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office   | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 23 Hari Kerja   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Persetujuan Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas  |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>471. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>472. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>473. telepon: 0811 777 2197</p> <p>474. Twiter : @dpmpstspkepri</p> <p>475. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri</p> <p>476. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>477. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id</p> <p>478. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a></p> <p>479. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a></p> <p>480. e-lapor: lapor.go.id</p> |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Dasar Hukum                              | 831. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   |            |                   |             |            |                   |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>832. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>833. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>834. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>835. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>836. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>837. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>838. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>839. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>840. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>841. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>842. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>843. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>844. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>845. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>563. Internet</p> <p>564. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>565. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>566. <i>Touchscreen</i></p> <p>567. Alat Tulis Kantor</p> <p>568. Peralatan kantor</p> <p>569. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>570. Almari dokumen</p> <p>571. Telepon</p> <p>572. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>573. Meja dan kursi</p> <p>574. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>369. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>370. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>371. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>372. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>373. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 374. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>375. Mampu mengoperasikan OSS.<br>376. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 95. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>96. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>qqqq.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>rrrr.Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 95. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>96. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 471.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>472.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>473.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>474.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>475.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>476.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>477.Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra (Cashless)<br>478.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>479.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>480.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>95. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>96. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 167. Form Non Perizinan<br>168. Persyaratan Non Perizinan |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
|                               |  | 169.<br>urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                       | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>             |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>481. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>482. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>483. telepon: 0811 777 2197<br>484. Twiter : @dpmpstpkpri<br>485. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>486. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>487. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>488. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>489. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a><br>490. e-lapor: lapor.go.id |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 846. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>847. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan<br>848. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>849. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>850. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>851. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>852. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>853. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>854. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>855. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>856. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>857. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>858. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut</p> <p>859. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>860. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>861. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>862. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>575. Internet</p> <p>576. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>577. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>578. <i>Touchscreen</i></p> <p>579. Alat Tulis Kantor</p> <p>580. Peralatan kantor</p> <p>581. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>582. Almari dokumen</p> <p>583. Telepon</p> <p>584. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>585. Meja dan kursi</p> <p>586. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>377. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>378. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>379. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>380. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>381. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 382. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>383. Mampu mengoperasikan OSS.<br>384. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 97. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>98. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ssss.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>tttt. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 97. Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>98. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 481. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>482. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>483. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>484. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>485. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>486. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>487. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>488. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>489. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>490. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>97. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>98. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Penetapan DLKR/DKLP Pelabuhan Pengumpan Region

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN  |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |   |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 170. Form Non Perizinan<br>171. Persyaratan Non Perizinan |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
|                               |  | 172.<br>urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                       | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>             |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | SK Penetapan DLKR/DKLP Pelabuhan Pengumpulan Region  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>491. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>492. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>493. telepon: 0811 777 2197</p> <p>494. Twiter : @dpmpstpkpri</p> <p>495. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri</p> <p>496. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>497. ebsite: dpmpstpkpriprov.go.id</p> <p>498. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a></p> <p>499. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a></p> <p>500. e-lapor: lapor.go.id</p> |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>863. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>864. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan</p> <p>865. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>866. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</p>  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>867. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>868. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>869. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>870. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>871. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>872. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>873. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>874. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>875. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut</p> <p>876. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>877. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>878. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>879. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>587. Internet</p> <p>588. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>589. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>590. <i>Touchscreen</i></p> <p>591. Alat Tulis Kantor</p> <p>592. Peralatan kantor</p> <p>593. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>594. Almari dokumen</p> <p>595. Telepon</p> <p>596. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>597. Meja dan kursi</p> <p>598. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>385. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>386. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>387. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>388. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>389. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | 390. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>391. Mampu mengoperasikan OSS.<br>392. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 99. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>100. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>uuuu.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>vvvv.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 99. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>100. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 491. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>492. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>493. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>494. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>495. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>496. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>497. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>498. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>499. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>500. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>99. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>100. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.   |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional

| NO                               | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------------|----------|--------|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |          |        |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 1.                            | Persyaratan Pelayanan                    | 173. Form Non Perizinan<br>174. Persyaratan Non Perizinan<br>175. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                       | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>             |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 18 Hari Kerja  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | SK Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>501. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>502. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>503. telepon: 0811 777 2197<br>504. Twiter : @dpmpstpkpri<br>505. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>506. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>507. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>508. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>509. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a><br>510. e-lapor: lapor.go.id |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 880. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>881. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan<br>882. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>883. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>884. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>885. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>886. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>887. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>888. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</p> <p>889. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>890. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>891. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>892. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut</p> <p>893. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>894. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>895. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>896. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>599. Internet</p> <p>600. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>601. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>602. <i>Touchscreen</i></p> <p>603. Alat Tulis Kantor</p> <p>604. Peralatan kantor</p> <p>605. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>606. Almari dokumen</p> <p>607. Telepon</p> <p>608. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>609. Meja dan kursi</p> <p>610. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>393. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>394. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>395. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>396. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>Sarjana</p> <p>397. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>398. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>399. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>400. Mampu bekerja dalam tim</p>  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>101.Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>102.Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>www.</p> <p>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>xxxx.</p> <p>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>101. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>102. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>501.Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>502.Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>503.Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>504.Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>505.Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>506.Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>507.Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>508.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas</p> <p>509.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>510.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>101.Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>102.Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Surat Pengantar Pengerah (SPP) Lembaga Penyaluran Pembantu Rumah Tangga (LPPRT)**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 176. Form Non Perizinan<br>177. Persyaratan Non Perizinan<br>178. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | Pemohon    | Front Office      | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|                                  |  |  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 4 Hari Kerja   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Surat Pengantar Pengerah Lembaga Penyaluran Pembantu Rumah Tangga  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>511. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>512. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>513. telepon: 0811 777 2197<br>514. Twiter : @dpmpstspkepri<br>515. Instagram : @dpmpstspprovinsikepri<br>516. Facebook: DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>517. ebsite: dpmpstsp.kepriprov.go.id<br>518. mail : <a href="mailto:dpmpstspkepri20@gmail.com">dpmpstspkepri20@gmail.com</a><br>519. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri">https://www.youtube.com/@dpmpstspkepri</a><br>520. e-lapor: lapor.go.id |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN  |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum                           | <p>897. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 32 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>898. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;</p> <p>899. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>900. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>901. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>902. Undang-Undang No. <u>18 Tahun 2017</u> tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>903. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>904. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>905. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>906. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>907. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>908. Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>909. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>910. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>911. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>912. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>913. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>914. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>915. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>611. Internet</p> <p>612. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>613. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>614. <i>Touchscreen</i></p> <p>615. Alat Tulis Kantor</p> <p>616. Peralatan kantor</p> <p>617. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>618. Almari dokumen</p>  |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 619. Telepon<br>620. Mobil dan sepeda motor dinas<br>621. Meja dan kursi<br>622. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 401. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>402. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>403. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>404. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>405. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>406. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>407. Mampu mengoperasikan OSS.<br>408. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 103. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>104. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>yyyy.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>zzzz.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 103. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>104. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 511. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>512. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>513. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>514. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>515. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>516. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>517. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>518. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>519. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>520. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>103. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN   |
|----|----------|--|
|    |          | 104. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh seluruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Surat Pengantar Pengerahan (Spp) Antar Kerja Lokal (AKL)

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 179. Form Non Perizinan<br>180. Persyaratan Non Perizinan<br>181. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | Pemohon    | Front Office      | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTSP |             |            |                   |  |  |  |  |  |
|                                  |  |  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 4 Hari Kerja   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Surat Pengantar Pengerahan Antar Kerja Lokal (AKL)   |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>521. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>522. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>523. telepon: 0811 777 2197<br>524. Twiter : @dpmptspkepri<br>525. Instagram : @dpmptspprovinsikepri |            |                   |             |            |                   |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN    | URAIAN   |
|-------------------------------|-------------|--|
|                               |             | 526. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>527. ebsite: <a href="http://dpmptsp.kepriprov.go.id">dpmptsp.kepriprov.go.id</a><br>528. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>529. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>530. e-lapor: <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |             |  |
| 1.                            | Dasar Hukum | 916. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 32 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;<br>917. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;<br>918. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>919. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>920. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>921. Undang-Undang No. <u>18 Tahun 2017</u> tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<br>922. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>923. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>924. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>925. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>926. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>927. Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;<br>928. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>929. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja<br>930. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>931. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>932. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>933. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>934. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | Terpadu Satu Pintu.   |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 623. Internet<br>624. Aplikasi Non Perizinan<br>625. Komputer, Printer, Scanner<br>626. <i>Touchscreen</i><br>627. Alat Tulis Kantor<br>628. Peralatan kantor<br>629. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>630. Almari dokumen<br>631. Telepon<br>632. Mobil dan sepeda motor dinas<br>633. Meja dan kursi<br>634. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 409. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>410. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>411. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>412. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>413. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>414. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>415. Mampu mengoperasikan OSS.<br>416. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 105. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>106. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>aaaaa.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>bbbbb.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 105. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>106. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 521. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>522. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>523. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>524. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>525. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>526. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>527. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> ) |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 528.Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>529.Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>530.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya   |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>105.Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>106.Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Surat Pengantar Pengerahan (Spp) Antar Kerja Lokal (AKL)

| NO                               | KOMPONEN   | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan  | 182. Form Non Perizinan<br>183. Persyaratan Non Perizinan<br>184. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Menerima Produk</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Menerima Produk</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office   | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Menerima Produk</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian  | 4 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif  | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Surat Pengantar Pengerahan Antar Kerja Lokal (AKL)  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | <p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>531. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>532. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>533.<br/>elepon: 0811 777 2197</p> <p>534. Twiter : @dpmptspkepri</p> <p>535. Instagram : @dpmptspprovinsikepri</p> <p>536. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>537.<br/>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id</p> <p>538.<br/>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a></p> <p>539.<br/>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a></p> <p>540. e-lapor: lapor.go.id</p>  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | <p>935. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 32 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>936. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;</p> <p>937. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>938. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>939. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>940. Undang-Undang No. <u>18 Tahun 2017</u> tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>941. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>942. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>943. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>944. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>945. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>946. Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>947. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>948. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>949. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>950. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 951. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>952. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>953. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 635. Internet<br>636. Aplikasi Non Perizinan<br>637. Komputer, Printer, Scanner<br>638. <i>Touchscreen</i><br>639. Alat Tulis Kantor<br>640. Peralatan kantor<br>641. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>642. Almari dokumen<br>643. Telepon<br>644. Mobil dan sepeda motor dinas<br>645. Meja dan kursi<br>646. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 417. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>418. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>419. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>420. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>421. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>422. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>423. Mampu mengoperasikan OSS.<br>424. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 107. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>108. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ccccc.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>ddddd.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 107. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>108. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 531. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>532. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>533. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan   |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 534. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>535. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>536. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>537. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>538. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>539. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>540. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>107. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>108. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruh unit kerja.   |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Rekomendasi Surat Pengantar Pengerahan (SPP) Antar Kerja Daerah (AKAD)

| NO                               | KOMPONEN              | URAIAN   |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |                       |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan | 185. Form Non Perizinan<br>186. Persyaratan Non Perizinan<br>187. urat kuasa (jika diwakilkan) |



| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |              |             |            |                  |
|-------------------------------|--|---|--------------|-------------|------------|------------------|
|                               |  | Pemohon   | Front Office | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |
| 2.                            | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <pre> graph TD     A([Permohonan]) --&gt; B{Verifikas Berkas}     B -- Ya --&gt; C{Verifikas Berkas}     B -- Tidak --&gt; C     C -- Ya --&gt; D[Kajian Teknis/Survey]     D --&gt; E[Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan]     E --&gt; F{Persetujuan}     F -- Ya --&gt; G[Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan]     F -- Tidak --&gt; E     G --&gt; H[Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan]     H --&gt; I([Menerima Produk]) </pre>  |              |             |            |                  |
| 3.                            | Jangka Waktu Penyelesaian                | 4 Hari Kerja  |              |             |            |                  |
| 4.                            | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |              |             |            |                  |
| 5.                            | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Surat Pengantar Pengerahan Antar Kerja Daerah   |              |             |            |                  |
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>541. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>542. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>543. telepon: 0811 777 2197<br>544. Twiter : @dpmpstpkpri<br>545. Instagram : @dpmpstpprovinsikepri<br>546. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>547. ebsite: dpmpstpkpriprov.go.id<br>548. mail : <a href="mailto:dpmpstpkpri20@gmail.com">dpmpstpkpri20@gmail.com</a><br>549. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri">https://www.youtube.com/@dpmpstpkpri</a><br>550. e-lapor: lapor.go.id |              |             |            |                  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |              |             |            |                  |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 954. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 32 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;<br>955. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;<br>956. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>957. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>958. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  |              |             |            |                  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
|    |                                       | <p>Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>959. Undang-Undang No. <u>18 Tahun 2017</u> tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>960. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>961. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>962. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>963. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>964. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>965. Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>966. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>967. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>968. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>969. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>970. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>971. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>972. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>647. Internet</p> <p>648. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>649. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>650. <i>Touchscreen</i></p> <p>651. Alat Tulis Kantor</p> <p>652. Peralatan kantor</p> <p>653. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>654. Almari dokumen</p> <p>655. Telepon</p> <p>656. Mobil dan sepeda motor dinas</p> <p>657. Meja dan kursi</p> <p>658. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan</p>   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                  | <p>425. Kepala DPMPSTP : Minimal Sarjana</p> <p>426. Sekretaris : Minimal Sarjana</p> <p>427. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p>  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | <p>428. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana</p> <p>429. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda</p> <p>430. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait</p> <p>431. Mampu mengoperasikan OSS.</p> <p>432. Mampu bekerja dalam tim</p>  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | <p>109. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.</p> <p>110. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan</p>   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.</p> <p>Keterangan :</p> <p>eeeeee.</p> <p>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</p> <p>fffff.</p> <p>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | <p>109. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)</p> <p>110. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan</p>   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | <p>541. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)</p> <p>542. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan</p> <p>543. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan</p> <p>544. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan</p> <p>545. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan</p> <p>546. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan</p> <p>547. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra (<i>Cashless</i>)</p> <p>548. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas</p> <p>549. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)</p> <p>550. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya</p> |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;</p> <p>109. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan</p> <p>110. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja.</p>  |

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**Nama Pelayanan : Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS-AKAD)**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 188. Form Non Perizinan<br>189. Persyaratan Non Perizinan<br>190. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 4 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>551. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>552. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>553. telepon: 0811 777 2197<br>554. Twiter : @dpmpptskepri<br>555. Instagram : @dpmpptsprovinsikepri<br>556. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>557. ebsite: dpmppts.kepriprov.go.id<br>558. mail : <a href="mailto:dpmpptskepri20@gmail.com">dpmpptskepri20@gmail.com</a><br>559. outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmpptskepri">https://www.youtube.com/@dpmpptskepri</a><br>560. e-lapor: lapor.go.id |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b>    |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO | KOMPONEN                              | URAIAN   |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum                           | <p>973. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 32 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;</p> <p>974. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;</p> <p>975. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>976. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>977. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>978. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>979. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <p>980. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>981. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>982. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>983. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>984. Keputusan Presiden No.36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>985. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>986. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>987. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah</p> <p>988. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>989. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>990. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>991. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas | <p>659. Internet</p> <p>660. Aplikasi Non Perizinan</p> <p>661. Komputer, Printer, Scanner</p> <p>662. <i>Touchscreen</i></p> <p>663. Alat Tulis Kantor</p> <p>664. Peralatan kantor</p> <p>665. <i>front-office</i>, Ruang <i>back-office</i>, Ruang Rapat</p> <p>666. Almari dokumen</p>   |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 667. Telepon<br>668. Mobil dan sepeda motor dinas<br>669. Meja dan kursi<br>670. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 433. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>434. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>435. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>436. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>437. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>438. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>439. Mampu mengoperasikan OSS.<br>440. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 111. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>112. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>ggggg.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>hhhhh.<br>elaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 111. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>112. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 551. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>552. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>553. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>554. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>555. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>556. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>557. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>558. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan dan Surat Tugas<br>559. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)<br>560. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>111. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan  |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | 112. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPSTP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh seluruh unit kerja. |

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**Nama Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yayasan/LSM-UKS wilayah Provinsi**

| NO                               | KOMPONEN                                 | URAIAN  |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|---|------------|------------------|-------------|------------|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |   |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan                    | 191. Form Non Perizinan<br>192. Persyaratan Non Perizinan<br>193. urut kuasa (jika diwakilkan)  |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPSTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP |  |  |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office                             | Back Office   | Tim Teknis | Pimpinan DPMPSTP |             |            |                  |  |  |  |  |  |
|                                  |  |   |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian                | 10 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif                              | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku   |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan                         | Surat Tanda Pendaftaran Organisasi sosial/Yayasan/LSM-UKS wilayah Provinsi  |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |
| 6.                               | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>561. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>562. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>563. telepon: 0811 777 2197 |            |                  |             |            |                  |  |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN    | URAIAN   |
|-------------------------------|-------------|--|
|                               |             | 564. Twiter : @dpmptspkepri<br>565. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>566. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>567.<br>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>568.<br>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>569.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>570. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |             |  |
| 1.                            | Dasar Hukum | 992. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004<br>993. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>994. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>995. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan<br>996. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>997. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>998. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>999. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan<br>1000. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>1001. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>1002. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>1003. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>1004. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>1005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>1006. Keputusan Bersama Mendagri dan Mensos Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat<br>1007. Keputusan Menteri Sosial RI No.40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial<br>1008. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>1009. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>1010. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |



| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN  |
|----|--|---|
|    |  | Terpadu Satu Pintu.   |
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 671. Internet<br>672. Aplikasi Non Perizinan<br>673. Komputer, Printer, Scanner<br>674. <i>Touchscreen</i><br>675. Alat Tulis Kantor<br>676. Peralatan kantor<br>677. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>678. Almari dokumen<br>679. Telepon<br>680. Mobil dan sepeda motor dinas<br>681. Meja dan kursi<br>682. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 441. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>442. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>443. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>444. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>445. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>446. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>447. Mampu mengoperasikan OSS.<br>448. Mampu bekerja dalam tim  |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 113. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>114. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan   |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>iiiii. Setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>jjjjj. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.   |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 113. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>114. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan   |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 561. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>562. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>563. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>564. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>565. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>566. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>567. Semua transaksi pembayaran PNPB dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>568. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>569. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 570. Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya  |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>113. Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>114. Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se/uruk unit kerja. |

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Pelayanan : Surat Keterangan Penelitian

| NO                               | KOMPONEN   | URAIAN   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>KOMPONEN SERVICE DELIVERY</b> |  |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 1.                               | Persyaratan Pelayanan  | 194. Form Non Perizinan<br>195. Persyaratan Non Perizinan<br>196. urat kuasa (jika diwakilkan)   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 2.                               | Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Front Office</th> <th>Back Office</th> <th>Tim Teknis</th> <th>Pimpinan DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Permohonan</p> </td> <td> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menerima Produk</p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Pemohon    | Front Office     | Back Office | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP | <p>Permohonan</p> | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menerima Produk</p> |  |  |  |
| Pemohon                          | Front Office   | Back Office  | Tim Teknis | Pimpinan DPMPTSP |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| <p>Permohonan</p>                | <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Tidak</p> <p>Verifikas Berkas</p> <p>Ya</p> <p>Kajian Teknis/Survey</p> <p>Proses Penerbitan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Tidak</p> <p>Persetujuan</p> <p>Ya</p> <p>Mengadminist rasikan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menyerahkan Dokumen Izin/Penolakan</p> <p>Menerima Produk</p> |  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 3.                               | Jangka Waktu Penyelesaian  | 5 Hari Kerja   |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 4.                               | Biaya/Tarif  | Sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |
| 5.                               | Produk Pelayanan   | Surat Keterangan Penelitian  |            |                  |             |            |                  |                   |  |  |  |  |

| NO                            | KOMPONEN                                 | URAIAN  |
|-------------------------------|--|---|
| 6.                            | Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:<br>571. <i>Help Desk</i> pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>572. Kotak pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>573.<br>elepon: 0811 777 2197<br>574. Twiter : @dpmptspkepri<br>575. Instagram : @dpmptspprovinsikepri<br>576. Facebook: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau<br>577.<br>ebsite: dpmptsp.kepriprov.go.id<br>578.<br>mail : <a href="mailto:dpmptspkepri20@gmail.com">dpmptspkepri20@gmail.com</a><br>579.<br>outube : <a href="https://www.youtube.com/@dpmptspkepri">https://www.youtube.com/@dpmptspkepri</a><br>580. e-lapor: lapor.go.id   |
| <b>KOMPONEN MANUFACTURING</b> |  |   |
| 1.                            | Dasar Hukum                              | 1011. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>1012. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>1013. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>1014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>1015. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>1016. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko<br>1017. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<br>1018. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>1019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan<br>1020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah<br>1021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian<br>1022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>1023. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kepulauan Riau<br>1024. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau<br>1025. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
| 2. | Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas      | 683. Internet<br>684. Aplikasi Non Perizinan<br>685. Komputer, Printer, Scanner<br>686. <i>Touchscreen</i><br>687. Alat Tulis Kantor<br>688. Peralatan kantor<br>689. <i>front-office</i> , Ruang <i>back-office</i> , Ruang Rapat<br>690. Almari dokumen<br>691. Telepon<br>692. Mobil dan sepeda motor dinas<br>693. Meja dan kursi<br>694. Unsur sarana dan prasarana bagi kelompok rentan  |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | 449. Kepala DPMPTSP : Minimal Sarjana<br>450. Sekretaris : Minimal Sarjana<br>451. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>452. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Minimal Sarjana<br>453. Tim Teknis OPD : Sarjana atau Sarjana Muda<br>454. Memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait<br>455. Mampu mengoperasikan OSS.<br>456. Mampu bekerja dalam tim   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 115. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan.<br>116. Rapat evaluasi harian, mingguan dan bulanan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah personil sebanyak 2 ( dua ) orang.<br>Keterangan :<br>kkkkk.<br>etiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.<br>lllll. Melaksanakan tugas selain pelayanan perizinan berdasarkan disposisi atasan langsung.  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | 115. Pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah tanpa pungutan liar. Jika pemohon menemukan pungutan lain di luar ketentuan, maka dapat melapor kepada instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan (Inspektorat)<br>116. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung melalui nomor Whatshapp yang didaftarkan  |
| 7. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | 571. Disediakan minimal 2 orang petugas keamanan pada area loket pelayanan (1 di dalam, 1 di luar)<br>572. Disediakan tabung pemadam kebakaran di area loket pelayanan<br>573. Disediakan kamera pengawas (CCTV) pada area loket pelayanan<br>574. Disediakan informasi jalur evakuasi dalam keadaan darurat pada area loket pelayanan<br>575. Disediakan informasi titik kumpul dalam keadaan darurat pada area gedung pelayanan<br>576. Setiap penerimaan berkas oleh Petugas akan disertai tanda bukti penerimaan<br>577. Semua transaksi pembayaran PNBPN dilakukan melalui bank mitra ( <i>Cashless</i> )<br>578. Semua petugas lapangan dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Tugas<br>579. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) |

| NO | KOMPONEN                   | URAIAN   |
|----|----------------------------|--|
|    |                            | 580.Produk layanan dibubuhi tanda tangan serta cap basah/tanda tangan elektronik, sehingga dijamin keasliannya   |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan pengguna layanan dengan mekanisme;<br>115.Survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang diisi secara <i>online</i> oleh pengguna layanan setelah menerima produk pelayanan<br>116.Data isian survei yang masuk akan diolah oleh sistem dan kemudian hasilnya akan diumumkan pada <i>web</i> DPMPTSP dan akan menjadi bahan evaluasi oleh se;uruh unit kerja. |

**an. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19690329 199003 1 009